



Katalog : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2013-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia**

Statistik Keuangan
Pemerintah Provinsi
Financial Statistics of Province Government
2013-2016



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2013-2016

Financial Statistics of Province Government 2013-2016

ISSN. 0126.7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1607

Katalog / Catalog : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : vi + 149 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

© Badan Pusat Statistik

© BPS–Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Badan Pusat Statistik

BPS-Statistics Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purposes without permission from BPS-Statistics Indonesia

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2013-2015. Selain data realisasi APBD, publikasi ini memuat pula data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Desember 2016
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Suhariyanto

INTRODUCTION

Provincial Government Financial Statistics is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistic Indonesia. The financial data are obtained from the office of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data and information presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years of 2013-2015. In addition, this publication also contains data on State (Budget) Revenue and Expenditure in 2016.

We are grateful and thanks to all those who have given their support which make this publication be realized. Constructive suggestions from the users are expected for further improvement for the next issues.

Jakarta, December 2016

BPS-STATISTICS INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Suhariyanto', with a stylized flourish at the end.

Dr. Suhariyanto
Chief Statistician

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<i>PAGE</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2013-2016</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan/ <i>Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt 2013-2016</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2013-2016</i>	81
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2013-2016</i>	93
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran/ <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2013-2016</i>	97

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> <i>TABLE</i>	<u>HALAMAN</u> <i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia</i> 2013-2016.....	135
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual</i> <i>Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia</i> 2013- 2016.....	144
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout</i> <i>Indonesia</i> 2013-2016	148

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Periode yang dicakup adalah empat tahun anggaran, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipt and Expenditure of provincial governments all around Indonesia. The time period is for the four fiscal years, i.e. from 2013 to 2016.

Some indicators/important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenue and expenditure of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant/relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in attempting to

Masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Regional Finance and Asset Management Agency of the Governor office all over Indonesia which is collected through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

1.3. Concept and Definition

Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government is the realization/provincial budget calculations for every fiscal year.

Revenue

Revenue consists of:

- a. Original Local Government Revenue*
- b. Balanced Budget*
- c. Other Legal Revenue*

Original Local Government Revenue is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta,

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

Local Taxes is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.

Retributions is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps,

pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

fishing vessel testing, the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government Wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity/investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and/or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*)

Balanced Budget is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share/Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).

Tax share consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.

Non-Tax Share consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration/exploitation/royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil/gas nature result, and others.

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap

dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat

across regions and the equalization of fiscal capacity in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation of the region*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund

yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung

adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

which is fund of the state budget allocated to areas get a national disaster, extraordinary experiencing a national disaster, extraordinary events and/or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds/balancing/adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure

consists of:

1. *Indirect Expenditure*
2. *Direct Expenditure*

Indirect Expenditure is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.

Indirect Personnel Expenditure is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided to civil servants

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

Interest Expenditure is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.

Subsidies Expenditure is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company/organisation, so that the selling price of the goods/services produced can be affordable. The intended company/agency must be providing products or services for public/society needs.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah

***Grant Expenditure** is expenditure that has been setting out to give to other party as a grant, both in form of money, goods and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate/state/ enterprise, agency/institution/ organization, or community group/ individual.*

***Social Assistance Expenditure** is expenditure that is budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.*

***Social Assistance to Community Organizations** is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.*

***Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government** is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district/city, village, or a particular local government revenue*

daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- *Tax shares expenditure to the provincial government*
- *Local tax shares expenditure to the district / city*
- *Local tax shares expenditure to the village government*
- *Local retribution shares to the district / city*
- *Local retribution shares to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability. General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Specific financial assistance is the assistance where the used and the management of fund is directed by the donor government.

Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local government/other village government*
- *Financial assistance to Political Party*

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activity that is unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait

Direct Expenditure is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan, pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.

Direct Personnel Expenditure is expenses used for honorarium/ wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.

Goods and Services Expenditure is expenses used for purchasing/ procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.

Purchasing/procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Capital Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods).

The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural tools, equipment and office supplies, computers, mebeulair, kitchen appliances, room interior design, studio equipment, communication tools, measuring tools, medical equipment, laboratory equipment, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, buildings, books/literature, arts, animal procurement/ livestock and plants, as well as weapons/ security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and /or expenditure that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Total net financing should be able to cover the budget deficit, on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

Local government financing consists of:

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

1. *Local government financing receipt;*
 - a. *Last fiscal year budget surplus*
 - b. *Transfer from reserved fund*
 - c. *Receipt form loans and bonds*
 - d. *Income of separated selling assets*
2. *Local government financing expenditure;*
 - a. *Transfer to reserved fund*
 - b. *Equity*
 - c. *Principal payment of debt*
 - d. *Current fiscal year budget surplus*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Last Fiscal Year Budget Surplus is *last fiscal year surplus/deficit plus the financing receipt less financing expenditure.*

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

***Reserved Fund Disbursement** is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.*

***Income of Separated Property Sales Results** is the selling of government assets through third party, or the income of local government divestment of equity.*

***Local Government Revenue from Loan** is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.*

***Revenue from Lending** is all revenue obtained from lending to the central government and/or to other local government.*

***Establishment of Reserved Fund** is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not be*

Sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

fully implemented in one fiscal year.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Equity (Investment) of Local Government is government expenses that allocated to equity/investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state/public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and/or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus is a surplus/deficit added by the financing receipt subtracted by financing expenditure.

<http://www.bps.go.id>

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

Regional development is an effort to create the government which has reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standar and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district/city level must be carried out effectively and efficiently. Thereby, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulates the Receipt and Expenditure Budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public services oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spured to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 205,78 triliun rupiah pada tahun 2013; 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014; dan 242,71 triliun rupiah pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,36 persen pada tahun 2014 dan 4,04 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 15,10 persen menjadi 279,34 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2016, lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan, khususnya komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang naik sebesar 714,40 persen dibanding tahun 2015. Peningkatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total revenue in Indonesia during 2013-2016 continue to increase, with the total revenue of 205.78 trillion rupiahs in 2013, 233.28 trillion rupiahs in 2014, and 242.71 trillion rupiahs in 2015, or increased by 13.36 percent; and 4.04 percent respectively. In 2016, the revenue of provincial government is targeted to increase by 15.10 percent to 279.34 trillion rupiahs. The increasing in 2016 was mostly caused by the increasing of balanced budget, especially from Special Allocation Fund (DAK) which increased by 714.40 percent. This condition is the result of the efforts that have been made by the Government to support the theme of The Government Work Plan (RKP) 2016 that is accelerating infrastructure development to strengthen the foundation of quality development. Moreover, the increasing was also supported by the increasing of

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya komponen hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang naik sebesar 22,08 persen dibandingkan tahun 2015. Provinsi yang memiliki pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2016 adalah Kalimantan Utara yaitu sebesar 36,96 persen dibanding tahun 2015.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.

Original Government Revenue (PAD), especially from income of regional government corporate and management of separated regional government wealth component which increased by 22.08 percent. Kalimantan Utara as the province that have the highest growth in 2016 which increased by 36.96 percent.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region.

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2013-2016
Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (Billion Rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pendapatan	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	101 596	121 451	127 497	138 506
a.	Pajak Daerah	86 980	103 088	107 892	117 025
b.	Retribusi Daerah	1 268	1 705	1 690	1 863
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 838	2 972	3 224	3 936
d.	Lain-lain PAD yang Sah	10 511	13 685	14 692	15 680
2.	Dana Perimbangan	64 834	68 883	61 589	101 279
a.	Bagi Hasil Pajak	17 781	17 482	13 330	24 080
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 300	15 406	9 359	9 680
c.	Dana Alokasi Umum	30 978	34 122	35 289	38 119
d.	Dana Alokasi Khusus	1 775	1 873	3 610	29 400
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	39 350	42 944	53 620	39 558
JUMLAH/TOTAL		205 780	233 277	242 706	279 343

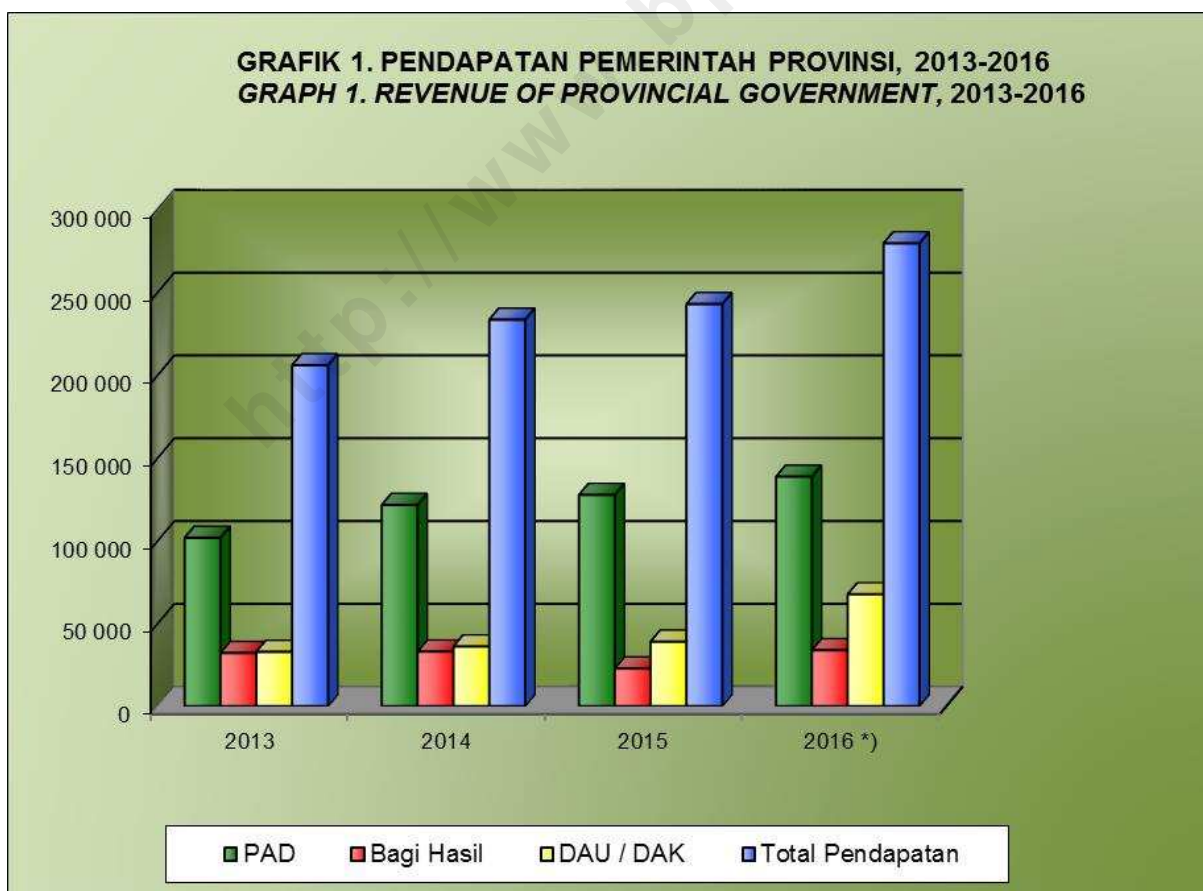
*) Data APBD

Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Selama periode tahun 2013-2015, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 101,60 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 121,45 triliun rupiah pada tahun 2014 dan 127,50 triliun rupiah pada tahun 2015. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD.

The local government that has capability to increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized the existing potential optimally.

During the period 2013-2015, the development of PAD was steady increasing, i.e, from 101.60 trillion rupiah in 2013 to 121.45 trillion rupiahs in 2014 and 127.50 trillion rupiahs in 2015. This increasing was supported by local tax revenue as the biggest contribution to PAD in each years.



Komponen lain-lain PAD yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah

Pada tahun 2016, PAD ditargetkan naik menjadi 138,51 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 8,46 persen.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali”, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat

The second biggest contribution was from others legal PAD, followed by management of separated local government wealth, and retributions.

In 2016, PAD was targeted to 138.51 trillion rupiahs, while tax revenue was targeted to increase by 8.46 percent.

*PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local government. If the level of independence of a region is “**very low**”, it can be said that the central government has*

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2013-2016
The Distribution of Province in Indonesia by Independence Rate Categories 2013-2016

Kategori Kemandirian	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah Sekali (0-25 %)	8	7	7	10
Rendah (>25-50 %)	15	15	16	16
Sedang (>50-75 %)	10	11	10	8
Tinggi (>75%)	0	0	1	0
Jumlah	33	33	34	34

*) Data APBD

memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “**rendah**”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “**sedang**”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “**tinggi**”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2013 hingga 2015 masih berkisar antara 40 hingga 50 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut masih dikategorikan rendah. Pada tahun 2013 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 49,37 persen dimana masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi belum dapat dikatakan mandiri.

*the dominant role than the local government itself. Meanwhile, if a region has a degree of independence “**low**”, it means that the central government intervention has been decreased, because the region is considered to be a little more able to implement regional autonomy. Then, for the government with “**medium**” category, it means that the government region has been able to implement regional autonomy, while the category of “**high**”, it could be mean that the local government has been able and independent in carrying out the affairs of local autonomy.*

PAD contribution to total revenue of provincial government in 2013 to 2015 was in the range 40 to 50 percent. Thus, on average, the independence level of provinces in Indonesia is categorized as low level. In 2013, the independence level of provinces in Indonesia was 49.37 percent which was still in low level. It indicated that, in general, the provincial government still can not be said to be independent.

Pada tahun 2014, kontribusi PAD mengalami kenaikan menjadi 52,06 persen, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 52,53 persen pada tahun 2015. Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya pada tahun 2016, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya menurun menjadi 49,58 persen.

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari PAD tetap memberikan peranan terbesar. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang

In 2014, PAD contribution increased to 52.06 percent; and become 52.53 percent in 2015. The provincial government was very careful in targeting the PAD in 2016, for the reason of that they could not meet the target. Consequently, PAD contribution to total revenue decreased to 49.58 percent in 2016.

Moreover, from table C it can be seen that the PAD contribution to total revenue had dominant effect. Local taxes were component of PAD which had

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2013-2016
Revenue Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (percent), 2013-2016

No.	Jenis Pendapatan	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	49,37	52,06	52,53	49,58
a.	Pajak Daerah	42,27	44,19	44,45	41,89
b.	Retribusi Daerah	0,62	0,73	0,70	0,67
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,38	1,27	1,33	1,41
d.	Lain-lain PAD yang Sah	5,11	5,87	6,05	5,61
2.	Dana Perimbangan	31,51	29,53	25,38	36,26
a.	Bagi Hasil Pajak	8,64	7,49	5,49	8,62
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6,95	6,60	3,86	3,47
c.	Dana Alokasi Umum	15,05	14,63	14,54	13,65
d.	Dana Alokasi Khusus	0,86	0,80	1,49	10,52
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	19,12	18,41	22,09	14,16
JUMLAH/ TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

memiliki kontribusi paling besar dengan besaran yang terus meningkat pada tahun 2013-2015, yaitu sebesar 42,27 persen pada tahun 2013; 44,19 persen pada tahun 2014; dan 44,45 persen pada tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD dianggarkan menurun menjadi sebesar 41,89 persen.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 31,51 persen; 29,53 persen; dan 25,38 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2013-2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 kontribusi dana perimbangan ditargetkan meningkat menjadi sebesar 36,26 persen.

Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu i) dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, ii) dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini berasal dari DAU, diikuti dengan bagi hasil pajak.

the biggest contribution, with the value was always increased in 2013-2015. The values were 42.27 percent in 2013, 44.19 percent in 2014, and 44.45 percent in 2015. The local taxes contribution to PAD also has been determined to decrease become 41.89 percent in 2016.

Revenue derived from the balanced budget has tendency to decrease with a contribution of 31.51 percent, 29.53 percent, and 25.38 percent during the period of 2013-2015. In 2016 the balanced budget contribution has been targeted to 36.26 percent.

The balanced budget consists of two parts, namely, i) the revenue from tax shares and natural resource shares, ii) the allocation of funds which include General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) that came from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget was from General Allocation Fund (DAU), followed by tax shares.

Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat kurang dari 20 persen.

Sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2013 kontribusi komponen ini hanya sebesar 19,12 persen sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 18,41 persen dan 22,09 persen. Dan di tahun 2016 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan mempunyai kontribusi yang menurun menjadi sebesar 14,16 persen.

Viewed from the DAU and DAK that given by central government, it showed that dependency level of local government to central government is less than 20 percent.

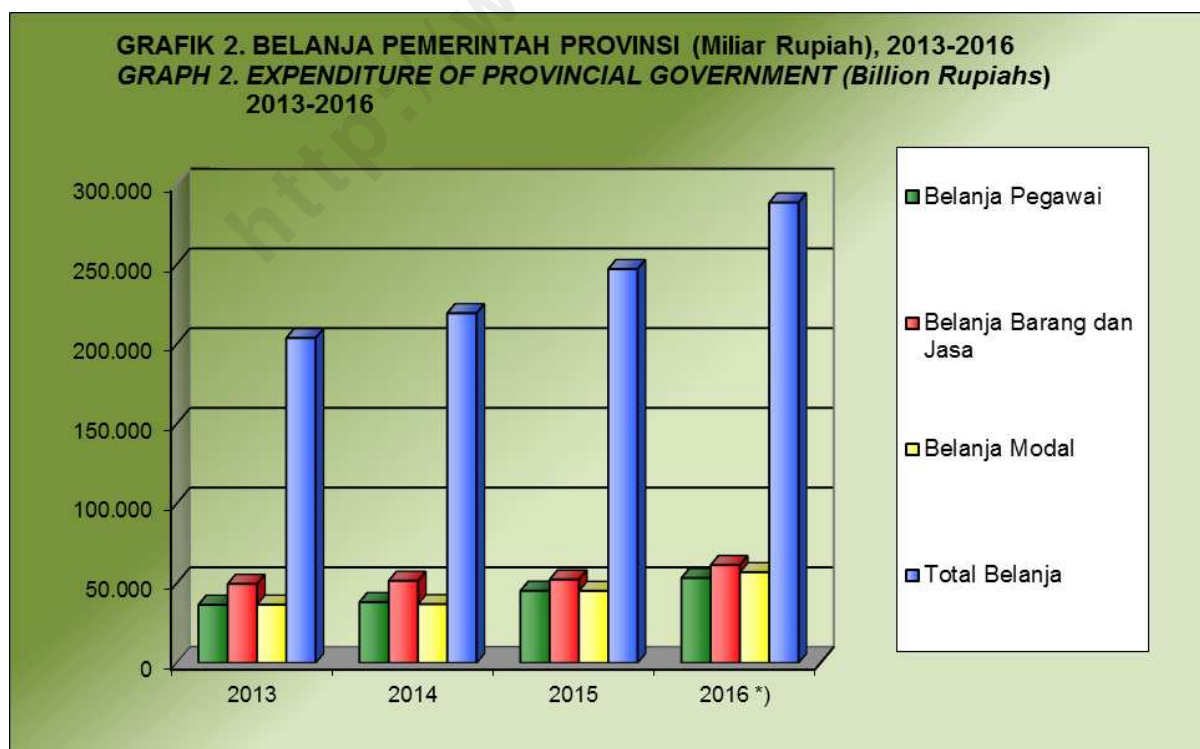
Then, the other component of local government revenue is others legal revenue that has the smallest contribution to total revenue. In 2013, its contribution amounted to 19.12 percent, while in 2014 and 2015 it was 18.41 percent and 22.09 percent respectively. However, for 2016 others legal revenue contribution was expected to decrease become 14.16 percent.

II.3. Belanja Daerah

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 203,75 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 219,33 triliun rupiah tahun 2014 dan 247,04 triliun rupiah pada tahun 2015. Pada tahun 2016 belanja daerah dianggarkan sebesar 288,76 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 16,89 persen dibanding tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

II.3. Local Government Expenditure

In general, local government expenditure during 2013-2016 increased every years, that was, from 203.75 trillion rupiahs in 2013 to 219.33 trillion rupiahs in 2014 and 247.04 trillion rupiahs in 2015. Whereas, in 2016 local government expenditure was targeted to 288.76 trillion rupiahs or increased by 16.89 percent compared to 2015. This increasing was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.



Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2013 dan 2014 terjadi surplus sedangkan pada tahun 2015 mengalami deficit. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan bernilai 242,71 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 247,04 triliun rupiah (Tabel D). Pada tahun 2016, diperkirakan juga akan terjadi defisit anggaran dimana pendapatan bernilai 279,34 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 288,76 triliun rupiah (Tabel D). Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan komponen pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci realisasi belanja pemerintah disajikan pada tabel D.

In terms of the realization of revenue and expenditure in 2013 and 2014, the provincial government budget experienced a surplus and in 2015 it experienced a deficit. In 2015 the value of revenue was 242.71 trillion rupiahs (Table A) and the expenditure was 247.04 trillion rupiahs (Table D). Whereas, in fiscal year 2016, it was estimated has deficit budget that reflected in the value of revenue that was 279.34 trillion rupiahs (Table A) and the expenditure was 288.76 trillion rupiahs (Table D). The deficit can be covered by the local government financing receipt. In details, the actual expenditure of local government can be seen in Table D.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah), 2013-2016
Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Belanja	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	109 748	123 758	143 156	163 490
1.	Belanja Pegawai	28 593	30 925	38 808	46 286
2.	Belanja Bunga	36	45	61	96
3.	Belanja Subsidi	26	32	694	1 666
4.	Belanja Hibah	35 964	33 018	39 957	49 867
5.	Belanja Bantuan Sosial	2 267	1 641	3 030	3 497
6.	Belanja Bagi Hasil	22 612	31 843	32 794	38 568
7.	Belanja Bantuan Keuangan	20 048	26 086	27 730	22 822
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	202	168	81	688
B.	BELANJA LANGSUNG	94 001	95 577	103 886	125 268
1.	Belanja Pegawai	7 874	7 216	6 430	6 983
2.	Belanja Barang dan Jasa	49 557	51 521	52 298	61 389
3.	Belanja Modal	36 569	36 839	45 158	56 896
JUMLAH/TOTAL		203 749	219 335	247 042	288 758

*) Data APBD

Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2013-2015, belanja tersebut berturut-turut sebesar 49,56 triliun rupiah, 51,52 triliun rupiah, dan 52,30 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 3,96 persen pada tahun 2014 dan 1,51 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 61,39 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 17,38 persen dibanding tahun 2015.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2013, belanja tersebut tercatat sebesar 36,47 triliun rupiah dan pada tahun 2014 sebesar 38,14 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 4,59 persen dari tahun 2013. Sementara itu, pada tahun 2015 realisasi belanja pegawai sebesar 45,24 triliun rupiah atau naik sebesar 18,61 persen dari tahun 2014. Dan di tahun 2016, belanja pegawai dianggarkan mengalami kenaikan sebesar 17,75 persen atau sebesar 53,27 triliun rupiah.

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was goods and services expenditure. During 2013 to 2015, the goods and services expenditure was recorded to 49.56 trillion rupiahs, 51.52 trillion rupiahs, and 52.30 trillion rupiahs or increased by 3.96 percent in 2014 and 1.51 percent in 2015. In 2016, goods and services expenditure has been budgeted to 61.39 trillion rupiahs or increased by 17.38 percent compared to 2015

The next dominant component of expenditure was personnel expenditure, covering both direct and indirect personnel expenditure. In 2013, it recorded at 36.47 trillion rupiahs, and in 2014 it amounted to 38.14 trillion rupiahs or increased by 4.59 persen to that in 2013. Meanwhile, personnel expenditure in 2015 was 45.24 trillion rupiahs or increased by 18.61 persen from one year before. Then, in 2016 it budgeted to 53.27 trillion rupiahs or increased by 17.75 percent.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen), 2013-2016
Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2013-2016

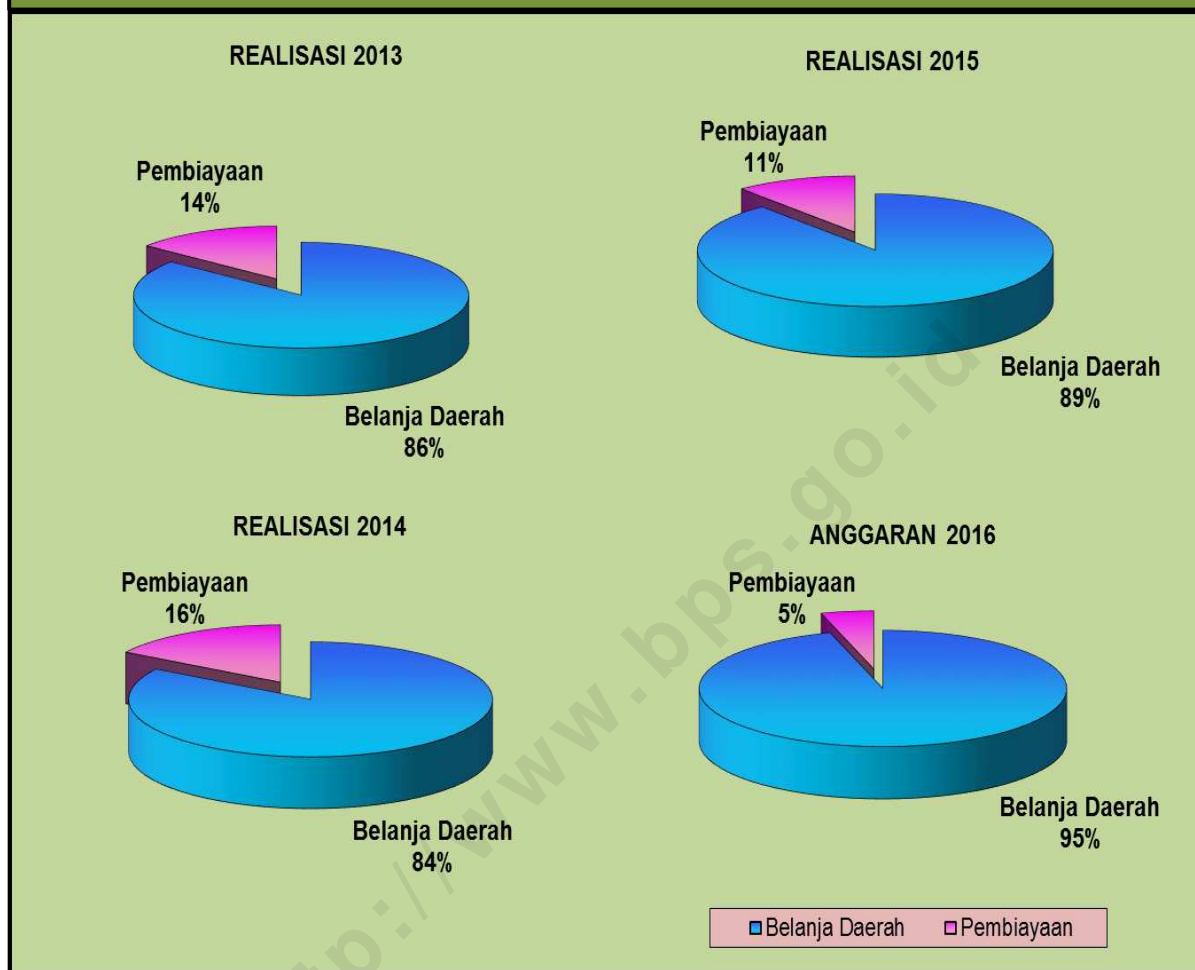
No.	Jenis Belanja	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53,86	56,42	57,95	56,62
1.	Belanja Pegawai	14,03	14,10	15,71	16,03
2.	Belanja Bunga	0,02	0,02	0,02	0,03
3.	Belanja Subsidi	0,01	0,01	0,28	0,58
4.	Belanja Hibah	17,65	15,05	16,17	17,27
5.	Belanja Bantuan Sosial	1,11	0,75	1,23	1,21
6.	Belanja Bagi Hasil	11,10	14,52	13,27	13,36
7.	Belanja Bantuan Keuangan	9,84	11,89	11,22	7,90
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0,10	0,08	0,03	0,24
B.	BELANJA LANGSUNG	46,14	43,58	42,05	43,38
1.	Belanja Pegawai	3,86	3,29	2,60	2,42
2.	Belanja Barang dan Jasa	24,32	23,49	21,17	21,26
3.	Belanja Modal	17,95	16,80	18,28	19,70
JUMLAH/ TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel E menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, dimana pada tahun 2013-2016 belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun 2013-2016, komponen belanja tidak langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja hibah dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,65 persen, 15,05 persen, 16,17 persen dan 17,27 persen.

Table E figured out the contribution of each component to total expenditure during 2013-2016, where the value of indirect expenditure was higher than direct expenditure. During 2013 to 2016, grant expenditure was the component with the highest contribution to indirect expenditure, namely 17.65 percent, 15.05 percent, 16.17 percent and 17.27 percent respectively.

GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI, 2013-2016
GRAPH 3. BUDGET ABSORPTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT, 2013-2016



Sementara itu, untuk belanja langsung, komponen yang mempunyai kontribusi yang besar adalah belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kontribusi keduanya sebesar 42,27 persen pada tahun 2013, 40,29 persen pada tahun 2014, 39,45 persen pada tahun 2015, dan dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 40,96 persen pada tahun 2016.

Meanwhile, in terms of direct expenditure structure, the component with highest portion were goods and services expenditure and capital expenditure. The contribution of both expenditures were 42.27 percent in 2013, 40.29 percent in 2014, and 39.45 percent in 2015. It has been targeted to have contribution of 40.96 percent in 2016.

Penyerapan anggaran daerah yang merupakan persentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah pada tahun 2013 mencapai 85,85 persen, turun menjadi 83,81 persen pada tahun 2014 dan naik menjadi 88,99 persen pada tahun 2015. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 95,37 persen (grafik 3).

The absorption of local budget, which is represented by the percentage of actual expenditure to total revenue in 2013 was recorded as much as 85.85 percent, then decreased to 83.81 percent in 2014. In 2015, the absorption of budget increased to 88.99 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2016 was 95.37 percent (graph 3).

TABEL

TABLE 1.

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.a (juta rupiah), 2013
TABLE 1.a **ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**
 (million rupiahs), 2013

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	10 671 827	1 968 699	12 640 526	11 220 428	1 420 098	12 640 526
2.	Sumatera Utara	7 397 986	14 108	7 412 094	7 260 468	151 626	7 412 094
3.	Sumatera Barat	3 147 839	276 751	3 424 590	3 113 313	311 277	3 424 590
4.	R i a u	6 994 646	1 978 313	8 972 959	7 525 283	1 447 676	8 972 959
5.	J a m b i	2 886 305	690 767	3 577 072	3 010 741	566 331	3 577 072
6.	Sumatera Selatan	5 468 140	521 335	5 989 475	5 678 704	310 771	5 989 475
7.	Bengkulu	1 696 370	241 356	1 937 726	1 727 006	210 720	1 937 726
8.	Lampung	3 901 951	23 711	3 925 662	3 884 536	41 126	3 925 662
9.	Bangka Belitung	1 529 111	285 022	1 814 133	1 609 667	204 466	1 814 133
10.	Kepulauan Riau	2 843 718	514 289	3 358 007	2 715 832	642 175	3 358 007
11.	DKI Jakarta	39 517 544	9 463 721	48 981 265	38 301 502	10 679 763	48 981 265
12.	Jawa Barat	19 237 611	2 934 631	22 172 242	18 396 745	3 775 497	22 172 242
13.	Jawa Tengah	13 343 358	1 306 017	14 649 375	12 724 776	1 924 599	14 649 375
14.	D I Yogyakarta	2 583 057	403 200	2 986 257	2 509 643	476 614	2 986 257
15.	Jawa Timur	17 372 769	1 753 509	19 126 278	16 738 658	2 387 620	19 126 278
16.	Banten	6 230 230	450 814	6 681 044	5 295 139	1 385 905	6 681 044
17.	B a l i	4 109 378	899 203	5 008 581	3 868 741	1 139 840	5 008 581
18.	Nusa Tenggara Barat	2 379 594	28 135	2 407 729	2 379 594	28 135	2 407 729
19.	Nusa Tenggara Timur	2 393 070	245 945	2 639 015	2 381 311	257 704	2 639 015
20.	Kalimantan Barat	3 262 314	222 258	3 484 572	3 296 607	187 965	3 484 572
21.	Kalimantan Tengah	2 809 096	559 334	3 368 430	2 928 725	439 705	3 368 430
22.	Kalimantan Selatan	4 350 811	1 203 925	5 554 736	4 750 074	804 662	5 554 736
23.	Kalimantan Timur	11 631 697	3 198 904	14 830 601	13 780 245	1 050 356	14 830 601
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	2 062 083	252 914	2 314 997	2 025 591	289 406	2 314 997
26.	Sulawesi Tengah	2 132 935	147 789	2 280 724	2 145 228	135 496	2 280 724
27.	Sulawesi Selatan	4 867 593	149 803	5 017 396	4 924 218	93 178	5 017 396
28.	Sulawesi Tenggara	1 972 560	203 680	2 176 240	1 812 945	363 295	2 176 240
29.	Gorontalo	1 052 626	101 033	1 153 659	1 050 817	102 842	1 153 659
30.	Sulawesi Barat	1 073 860	101 380	1 175 240	1 044 071	131 169	1 175 240
31.	M a l u k u	1 545 465	149 438	1 694 903	1 576 449	118 454	1 694 903
32.	Maluku Utara	1 315 899	125 225	1 441 124	1 387 593	53 531	1 441 124
33.	Papua Barat	5 637 697	372 575	6 010 272	4 512 430	1 497 842	6 010 272
34.	P a p u a	8 361 139	768 416	9 129 555	8 171 352	958 203	9 129 555
JUMLAH/TOTAL		205 780 279	31 556 200	237 336 479	203 748 432	33 588 047	237 336 479

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.b (juta rupiah), 2014

TABLE 1.b **ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**

(million rupiahs), 2014

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 606 325	1 399 324	13 005 649	12 045 848	959 801	13 005 649
2.	Sumatera Utara	7 772 029	51 426	7 823 455	7 808 557	14 898	7 823 455
3.	Sumatera Barat	3 635 838	240 277	3 876 115	3 483 673	392 442	3 876 115
4.	R i a u	8 132 410	1 451 087	9 583 497	5 602 074	3 981 423	9 583 497
5.	J a m b i	3 165 056	514 103	3 679 159	3 204 633	474 526	3 679 159
6.	Sumatera Selatan	6 237 368	10 179	6 247 547	5 770 733	476 814	6 247 547
7.	Bengkulu	1 986 239	210 176	2 196 415	1 934 722	261 693	2 196 415
8.	Lampung	4 526 532	41 141	4 567 673	4 454 187	113 486	4 567 673
9.	Bangka Belitung	1 719 594	201 966	1 921 560	1 596 087	325 473	1 921 560
10.	Kepulauan Riau	2 919 185	538 525	3 457 710	3 312 459	145 251	3 457 710
11.	DKI Jakarta	43 824 301	7 593 995	51 418 296	37 799 664	13 618 632	51 418 296
12.	Jawa Barat	22 310 953	3 586 472	25 897 425	20 797 988	5 099 437	25 897 425
13.	Jawa Tengah	15 157 460	1 689 438	16 846 898	15 086 065	1 760 833	16 846 898
14.	D I Yogyakarta	3 139 872	389 527	3 529 399	2 981 068	548 331	3 529 399
15.	Jawa Timur	20 772 484	1 846 787	22 619 271	20 006 319	2 612 952	22 619 271
16.	Banten	7 068 433	1 069 805	8 138 238	6 192 156	1 946 082	8 138 238
17.	B a l i	4 577 678	1 039 710	5 617 388	4 491 646	1 125 742	5 617 388
18.	Nusa Tenggara Barat	2 789 427	13 828	2 803 255	2 614 100	189 155	2 803 255
19.	Nusa Tenggara Timur	2 787 589	235 105	3 022 694	2 693 049	329 645	3 022 694
20.	Kalimantan Barat	3 719 770	127 745	3 847 515	3 652 914	194 601	3 847 515
21.	Kalimantan Tengah	3 129 695	386 720	3 516 415	3 235 800	280 615	3 516 415
22.	Kalimantan Selatan	4 793 165	863 395	5 656 560	4 917 828	738 732	5 656 560
23.	Kalimantan Timur	11 285 828	1 050 356	12 336 184	11 274 556	1 061 628	12 336 184
24.	Kalimantan Utara	1 513 353	313 461	1 826 814	642 365	1 184 449	1 826 814
25.	Sulawesi Utara	2 320 811	249 382	2 570 193	2 229 484	340 709	2 570 193
26.	Sulawesi Tengah	2 440 227	147 909	2 588 136	2 445 661	142 475	2 588 136
27.	Sulawesi Selatan	5 503 161	339 681	5 842 842	5 600 387	242 455	5 842 842
28.	Sulawesi Tenggara	2 189 560	331 004	2 520 564	2 088 600	431 964	2 520 564
29.	Gorontalo	1 209 049	92 443	1 301 492	1 204 490	97 002	1 301 492
30.	Sulawesi Barat	1 240 242	129 255	1 369 497	1 227 422	142 075	1 369 497
31.	M a l u k u	1 823 030	89 520	1 912 550	1 726 133	186 417	1 912 550
32.	Maluku Utara	1 508 578	24 142	1 532 720	1 481 565	51 155	1 532 720
33.	Papua Barat	5 762 348	1 334 409	7 096 757	5 428 849	1 667 908	7 096 757
34.	P a p u a	10 709 819	833 203	11 543 022	10 303 787	1 239 235	11 543 022
JUMLAH/TOTAL		233 277 409	28 435 496	261 712 905	219 334 869	42 378 036	261 712 905

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.c (juta rupiah), 2015

TABLE **ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**

(million rupiahs), 2015

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 694 163	916 943	12 611 106	12 149 422	461 684	12 611 106
2.	Sumatera Utara	8 480 759	14 898	8 495 657	7 959 167	536 490	8 495 657
3.	Sumatera Barat	4 052 249	274 105	4 326 354	4 022 257	304 097	4 326 354
4.	R i a u	6 911 045	3 981 811	10 892 856	7 760 972	3 131 884	10 892 856
5.	J a m b i	3 129 719	474 526	3 604 245	3 425 566	178 679	3 604 245
6.	Sumatera Selatan	5 990 424	39 970	6 030 394	5 190 199	840 195	6 030 394
7.	Bengkulu	2 180 679	255 525	2 436 204	2 282 345	153 859	2 436 204
8.	Lampung	4 787 308	111 475	4 898 783	4 781 202	117 581	4 898 783
9.	Bangka Belitung	1 886 999	325 654	2 212 653	1 869 959	342 694	2 212 653
10.	Kepulauan Riau	2 513 438	136 340	2 649 778	2 605 394	44 384	2 649 778
11.	DKI Jakarta	44 209 238	9 209 782	53 419 020	43 031 323	10 387 697	53 419 020
12.	Jawa Barat	24 009 981	4 551 872	28 561 853	24 417 606	4 144 247	28 561 853
13.	Jawa Tengah	16 828 154	1 689 437	18 517 591	17 820 760	696 831	18 517 591
14.	D I Yogyakarta	3 400 015	511 093	3 911 108	3 496 426	414 682	3 911 108
15.	Jawa Timur	22 228 450	2 450 199	24 678 649	22 946 308	1 732 341	24 678 649
16.	Banten	7 328 221	1 907 994	9 236 215	8 084 140	1 152 075	9 236 215
17.	B a l i	4 967 967	905 741	5 873 708	4 999 031	874 677	5 873 708
18.	Nusa Tenggara Barat	3 448 586	198 748	3 647 334	3 364 904	282 430	3 647 334
19.	Nusa Tenggara Timur	3 315 669	254 559	3 570 228	3 328 496	241 732	3 570 228
20.	Kalimantan Barat	4 073 147	134 601	4 207 748	4 123 636	84 112	4 207 748
21.	Kalimantan Tengah	3 252 748	294 181	3 546 929	3 482 434	64 495	3 546 929
22.	Kalimantan Selatan	4 746 943	753 331	5 500 274	5 102 865	397 409	5 500 274
23.	Kalimantan Timur	9 376 313	0	9 376 313	8 598 988	777 325	9 376 313
24.	Kalimantan Utara	1 444 383	1 184 449	2 628 832	1 893 597	735 235	2 628 832
25.	Sulawesi Utara	2 527 959	290 709	2 818 668	2 693 084	125 584	2 818 668
26.	Sulawesi Tengah	2 901 588	135 830	3 037 418	2 953 281	84 137	3 037 418
27.	Sulawesi Selatan	6 105 815	309 745	6 415 560	6 149 605	265 955	6 415 560
28.	Sulawesi Tenggara	2 471 389	415 301	2 886 690	2 349 274	537 416	2 886 690
29.	Gorontalo	1 389 324	87 003	1 476 327	1 407 931	68 396	1 476 327
30.	Sulawesi Barat	1 473 750	0	1 473 750	1 385 842	87 908	1 473 750
31.	M a l u k u	2 132 589	171 948	2 304 537	2 280 091	24 446	2 304 537
32.	Maluku Utara	1 801 248	54 882	1 856 130	1 808 760	47 370	1 856 130
33.	Papua Barat	5 840 353	1 665 917	7 506 270	6 880 167	626 103	7 506 270
34.	P a p u a	11 805 767	1 180 865	12 986 632	12 396 447	590 185	12 986 632
JUMLAH/TOTAL		242 706 380	34 889 434	277 595 814	247 041 479	30 554 335	277 595 814

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.d (juta rupiah), 2016

TABLE **RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**

(million rupiahs), 2016

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	12 551 166	328 466	12 879 632	12 874 632	5 000	12 879 632
2.	Sumatera Utara	9 973 988	1 124	9 975 112	9 950 844	24 268	9 975 112
3.	Sumatera Barat	4 595 704	228 500	4 824 204	4 774 204	50 000	4 824 204
4.	R i a u	7 588 648	3 383 426	10 972 074	10 972 074	0	10 972 074
5.	J a m b i	3 441 963	300 060	3 742 023	3 742 023	0	3 742 023
6.	Sumatera Selatan	7 036 774	150 000	7 186 774	5 763 643	1 423 131	7 186 774
7.	Bengkulu	2 417 156	92 340	2 509 496	2 491 703	17 793	2 509 496
8.	Lampung	5 350 903	98 750	5 449 653	5 359 403	90 250	5 449 653
9.	Bangka Belitung	2 015 482	423 701	2 439 183	2 439 183	0	2 439 183
10.	Kepulauan Riau	3 026 807	30 000	3 056 807	3 056 807	0	3 056 807
11.	DKI Jakarta	59 004 784	8 163 358	67 168 142	59 945 523	7 222 619	67 168 142
12.	Jawa Barat	26 806 857	2 600 000	29 406 857	28 603 282	803 575	29 406 857
13.	Jawa Tengah	22 026 202	600 000	22 626 202	22 426 202	200 000	22 626 202
14.	D I Yogyakarta	3 921 069	405 924	4 326 993	4 189 993	137 000	4 326 993
15.	Jawa Timur	22 663 137	1 095 999	23 759 136	23 050 803	708 333	23 759 136
16.	Banten	8 005 287	878 289	8 883 576	8 811 076	72 500	8 883 576
17.	B a l i	5 619 450	415 679	6 035 129	5 948 132	86 997	6 035 129
18.	Nusa Tenggara Barat	3 576 521	30 000	3 606 521	3 575 496	31 025	3 606 521
19.	Nusa Tenggara Timur	3 876 020	82 570	3 958 590	3 898 591	59 999	3 958 590
20.	Kalimantan Barat	4 761 613	100 000	4 861 613	4 781 613	80 000	4 861 613
21.	Kalimantan Tengah	4 235 178	136 000	4 371 178	4 224 575	146 603	4 371 178
22.	Kalimantan Selatan	5 579 393	203 000	5 782 393	5 754 393	28 000	5 782 393
23.	Kalimantan Timur	10 296 924	800 000	11 096 924	11 096 924	0	11 096 924
24.	Kalimantan Utara	1 978 280	905 000	2 883 280	2 733 280	150 000	2 883 280
25.	Sulawesi Utara	3 001 755	84 012	3 085 767	3 060 767	25 000	3 085 767
26.	Sulawesi Tengah	3 312 289	93 992	3 406 281	3 397 081	9 200	3 406 281
27.	Sulawesi Selatan	6 851 572	50 000	6 901 572	6 715 572	186 000	6 901 572
28.	Sulawesi Tenggara	2 641 119	232 043	2 873 162	2 768 763	104 399	2 873 162
29.	Gorontalo	1 682 038	13 329	1 695 367	1 693 867	1 500	1 695 367
30.	Sulawesi Barat	1 706 337	447 691	2 154 028	2 152 028	2 000	2 154 028
31.	M a l u k u	2 479 134	111 464	2 590 598	2 556 362	34 236	2 590 598
32.	Maluku Utara	2 241 174	112 345	2 353 519	2 341 519	12 000	2 353 519
33.	Papua Barat	6 165 288	849 809	7 015 097	6 930 094	85 003	7 015 097
34.	P a p u a	8 912 516	0	8 912 516	6 678 365	2 234 151	8 912 516
JUMLAH/TOTAL		279 342 528	23 446 871	302 789 399	288 758 817	14 030 582	302 789 399

TABEL

TABLE 2.

TABEL 2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	205 780 279 058	233 277 408 354	242 706 379 550	279 342 528 314
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	101 596 400 437	121 450 818 035	127 497 344 793	138 505 621 253
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	86 979 670 640	103 087 606 002	107 892 424 971	117 025 492 117
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	1 267 843 490	1 705 308 478	1 689 511 259	1 863 248 757
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	2 837 923 962	2 972 476 313	3 223 546 144	3 936 385 677
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	10 510 962 345	13 685 427 242	14 691 862 419	15 680 494 702
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	64 834 193 347	68 882 788 511	61 588 703 775	101 279 094 232
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	17 781 418 940	17 481 607 781	13 330 307 560	24 079 911 412
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	14 299 514 233	15 406 003 394	9 359 409 265	9 679 911 960
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	30 977 874 897	34 121 932 565	35 288 784 853	38 119 009 673
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	1 775 385 277	1 873 244 771	3 610 202 097	29 400 261 187
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	39 349 685 274	42 943 801 808	53 620 330 982	39 557 812 829
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	31 556 200 366	28 435 496 655	34 889 433 724	23 446 870 767
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		237 336 479 424	261 712 905 009	277 595 813 274	302 789 399 081

*) Data APBD

TABEL 2.1 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	10 671 826 520	11 606 324 715	11 694 163 500	12 551 166 051
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 325 435 091	1 731 130 840	1 985 835 617	2 057 481 533
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	752 846 745	1 030 679 175	1 172 685 150	1 219 985 562
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	6 346 062	3 701 217	4 799 511	11 802 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	123 628 755	134 013 450	165 102 922	201 085 953
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	442 613 529	562 736 998	643 248 034	624 607 518
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 675 448 212	2 551 683 310	1 561 778 473	1 670 711 099
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	254 514 663	77 430 824	205 970 244	225 938 766
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 253 339 521	1 199 685 909	47 047 187	25 650 844
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 092 445 518	1 201 612 787	1 237 894 986	1 263 870 989
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	75 148 510	72 953 790	70 866 056	155 250 500
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 670 943 217	7 323 510 565	8 146 549 410	8 822 973 419
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 968 699 122	1 399 323 697	916 943 238	328 465 896
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		12 640 525 642	13 005 648 412	12 611 106 738	12 879 631 947

*) Data APBD

TABEL 2.2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 397 986 772	7 772 029 153	8 480 758 953	9 973 988 772
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	4 091 285 887	4 416 811 865	4 883 880 619	4 630 468 148
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	3 685 437 788	4 054 634 671	4 427 143 659	4 168 615 292
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	79 173 619	78 497 614	36 071 947	31 964 609
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	229 337 171	156 330 873	250 240 903	261 613 672
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	97 337 309	127 348 707	170 424 110	168 274 575
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 710 602 556	1 812 638 981	1 521 253 168	2 272 745 765
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	424 244 826	380 468 139	313 793 086	485 325 624
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	8 088 878	23 310 178	20 451 831	30 591 978
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 223 445 404	1 349 132 276	1 139 261 371	1 604 505 673
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	54 823 448	59 728 388	47 746 880	152 322 490
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	1 596 098 329	1 542 578 307	2 075 625 166	3 070 774 859
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	14 107 542	51 426 062	14 897 906	1 123 954
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 412 094 314	7 823 455 215	8 495 656 859	9 975 112 726

*) Data APBD

TABEL 2.3 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.3 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 147 840 359	3 635 837 761	4 052 249 308	4 595 703 758
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 366 178 102	1 729 222 284	1 876 733 122	1 894 690 226
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 085 164 285	1 354 541 147	1 445 611 641	1 427 515 224
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	34 595 713	16 751 318	20 373 635	16 734 498
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	93 871 535	94 207 475	85 124 659	87 920 007
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	152 546 569	263 722 344	325 623 187	362 520 497
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 240 879 867	1 333 059 018	1 390 876 415	2 649 114 355
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	131 404 781	132 678 673	94 446 104	164 008 171
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 610 600	16 385 839	12 570 605	10 700 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 039 922 511	1 129 886 306	1 221 128 606	1 261 915 864
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	63 941 975	54 108 200	62 731 100	1 212 490 320
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	540 782 390	573 556 459	784 639 771	51 899 177
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	276 750 267	240 276 961	274 104 643	228 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 424 590 626	3 876 114 722	4 326 353 951	4 824 203 758

*) Data APBD

TABEL 2.4 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.4 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 994 646 205	8 132 409 892	6 911 044 806	7 588 647 540
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	2 725 623 913	3 245 087 745	3 476 960 098	3 495 548 893
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	2 110 997 530	2 496 771 206	2 572 777 209	2 765 548 893
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	24 359 497	16 992 124	21 571 219	11 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	146 463 620	154 214 508	178 216 271	218 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	443 803 266	577 109 907	704 395 399	501 000 000
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	3 610 182 230	4 231 808 634	2 548 627 473	4 085 273 647
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	618 581 036	668 492 187	756 114 293	877 343 077
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	2 226 231 958	2 698 594 353	1 074 930 738	1 015 827 790
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	726 630 916	820 984 584	654 220 250	737 744 590
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	38 738 320	43 737 510	63 362 192	1 454 358 190
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	658 840 062	655 513 513	885 457 235	7 825 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 978 312 715	1 451 086 907	3 981 811 287	3 383 426 462
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		8 972 958 920	9 583 496 799	10 892 856 093	10 972 074 002

*) Data APBD

TABEL 2.5 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.5 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 886 305 068	3 165 055 793	3 129 718 818	3 441 962 713
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	1 063 922 065	1 281 239 473	1 241 237 022	1 273 892 967
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	841 884 452	1 010 560 585	1 010 318 980	1 062 315 000
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	15 363 759	14 587 181	19 336 664	20 609 509
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	26 879 028	32 219 309	33 956 073	33 503 058
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	179 794 826	223 872 398	177 625 305	157 465 400
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 489 852 560	1 514 518 389	1 419 079 798	1 549 917 106
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	246 548 942	194 972 088	179 892 405	198 816 567
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	353 397 070	321 853 079	172 076 759	126 008 641
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	836 578 062	948 337 712	1 009 165 864	1 070 452 478
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	53 328 486	49 355 510	57 944 770	154 639 420
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	332 530 443	369 297 931	469 401 998	618 152 640
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	690 767 077	514 103 467	474 526 425	300 060 345
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 577 072 145	3 679 159 260	3 604 245 243	3 742 023 058

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.6

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 468 139 691	6 237 367 763	5 990 424 062	7 036 774 157
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 021 696 787	2 407 905 239	2 534 526 413	2 733 329 641
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 882 596 916	2 267 779 726	2 324 865 133	2 512 149 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	16 522 296	11 422 670	17 229 351	15 782 584
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	59 352 769	30 668 098	60 861 027	86 416 657
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	63 224 806	98 034 745	131 570 902	118 980 700
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 649 216 454	2 982 866 001	2 329 728 331	2 713 196 347
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	572 654 634	548 897 750	578 423 875	788 752 758
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 180 856 653	1 385 670 591	749 983 666	694 574 028
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	870 516 767	985 542 760	931 915 470	1 071 421 391
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	25 188 400	62 754 900	69 405 320	158 448 170
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	797 226 450	846 596 523	1 126 169 318	1 590 248 169
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	521 334 563	10 179 492	39 970 123	150 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 989 474 254	6 247 547 255	6 030 394 185	7 186 774 157

*) Data APBD

TABEL 2.7 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.7 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 696 369 921	1 986 238 994	2 180 678 757	2 417 157 015
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	525 207 935	672 064 468	701 300 383	745 385 298
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	394 141 932	483 711 051	510 664 692	534 562 547
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	12 326 203	4 625 281	4 048 632	4 037 554
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	12 069 161	17 080 376	18 128 900	17 895 152
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	106 670 639	166 647 760	168 458 159	188 890 045
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	977 347 954	1 104 582 676	1 208 985 365	1 655 168 591
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	53 933 686	50 653 058	36 006 730	82 573 641
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	17 179 110	44 907 411	63 004 615	81 902 438
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	854 647 828	955 095 187	1 046 080 820	1 070 751 192
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	51 587 330	53 927 020	63 893 200	419 941 320
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	193 814 032	209 591 850	270 393 009	16 603 126
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	241 356 037	210 176 309	255 524 824	92 339 845
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 937 725 958	2 196 415 303	2 436 203 581	2 509 496 860

*) Data APBD

TABEL 2.8 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 901 950 614	4 526 532 292	4 787 308 489	5 350 902 785
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 771 297 935	2 274 685 573	2 247 342 668	2 446 043 678
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 547 336 215	1 946 452 924	1 963 322 717	2 199 300 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	8 672 979	9 253 336	10 376 054	9 880 079
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 144 919	25 462 865	25 715 957	26 980 639
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	190 143 822	293 516 448	247 927 940	209 882 960
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 384 043 537	1 472 486 569	1 514 291 529	1 821 186 563
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	145 424 014	142 641 117	105 182 867	156 586 924
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	117 848 110	144 940 791	66 912 823	57 317 167
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 060 663 183	1 136 053 041	1 097 129 439	1 321 679 032
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	60 108 230	48 851 620	245 066 400	285 603 440
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	746 609 142	779 360 150	1 025 674 292	1 083 672 544
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	23 710 615	41 141 205	111 474 702	98 750 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 925 661 229	4 567 673 497	4 898 783 191	5 449 652 785

*) Data APBD

TABEL 2.9 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.9 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 529 111 282	1 719 594 419	1 886 998 635	2 015 482 385
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	495 796 075	562 928 837	571 802 890	567 635 350
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	447 462 199	508 262 616	506 944 936	500 844 834
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	5 327 341	9 357 404	11 520 365	9 061 667
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	5 390 252	1 025 926	5 243 416	7 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	37 616 283	44 282 891	48 094 173	50 228 849
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	907 835 915	1 025 142 797	1 130 400 495	1 263 220 635
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	60 622 259	52 839 392	47 461 054	62 470 427
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	85 902 968	122 110 799	140 696 182	163 684 860
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	717 140 118	806 820 146	897 887 443	905 526 208
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	44 170 570	43 372 460	44 355 816	131 539 140
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	125 479 292	131 522 785	184 795 250	184 626 400
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	285 022 225	201 966 080	325 653 645	423 700 774
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 814 133 507	1 921 560 499	2 212 652 280	2 439 183 159

*) Data APBD

TABEL 2.10 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.10 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 843 717 790	2 919 185 332	2 513 438 254	3 026 806 719
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	907 982 039	1 070 208 289	1 012 146 824	1 109 056 420
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	852 188 093	1 006 068 104	951 535 874	1 040 848 920
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	13 413 198	2 713 029	2 013 340	3 062 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	2 559 183	0	3 740 233	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	39 821 565	61 427 156	54 857 377	65 145 000
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 753 710 493	1 664 959 883	1 246 121 773	1 641 530 391
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	198 090 541	203 987 983	167 100 440	266 736 254
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	862 879 432	721 284 492	340 540 412	354 689 521
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	656 067 610	698 009 318	695 943 711	866 810 696
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	36 672 910	41 678 090	42 537 210	153 293 920
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	182 025 258	184 017 160	255 169 657	276 219 908
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	514 289 374	538 524 513	136 340 165	30 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 358 007 164	3 457 709 845	2 649 778 419	3 056 806 719

*) Data APBD

TABEL 2.11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	39 517 544 012	43 824 300 561	44 209 238 168	59 004 784 464
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	26 852 192 453	31 274 215 886	33 686 176 815	39 322 613 624
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	23 370 213 237	27 050 949 024	29 076 926 598	32 010 000 000
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	333 787 344	515 162 936	459 459 498	800 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	397 234 722	465 979 963	527 280 486	790 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	2 750 957 150	3 242 123 963	3 622 510 233	5 722 613 624
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	9 387 539 402	9 677 533 225	5 887 267 645	13 867 897 878
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	8 863 205 864	9 279 068 989	5 751 741 853	13 819 992 249
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	225 151 072	312 478 954	135 525 792	47 905 629
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	299 182 466	85 985 282	0	0
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	3 277 812 157	2 872 551 450	4 635 793 708	5 814 272 962
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	9 463 721 531	7 593 994 776	9 209 781 909	8 163 357 322
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		48 981 265 543	51 418 295 337	53 419 020 077	67 168 141 786

*) Data APBD

TABEL 2.12 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	19 237 611 310	22 310 953 031	24 009 980 850	26 806 857 281
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	12 360 109 870	15 038 153 310	16 032 856 414	16 180 205 532
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	11 236 145 855	13 753 760 403	14 617 071 393	14 930 507 755
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	63 654 936	70 081 405	73 404 323	66 269 808
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	261 601 089	304 380 445	281 661 628	310 065 560
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	798 707 990	909 931 057	1 060 719 070	873 362 409
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	2 950 532 546	3 260 505 636	2 506 877 512	10 594 918 221
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	1 026 017 163	1 076 897 693	906 645 388	1 329 526 525
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	371 990 322	417 706 527	277 673 745	270 941 625
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 472 453 011	1 687 686 386	1 303 654 355	1 247 045 751
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	80 072 050	78 215 030	18 904 024	7 747 404 320
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	3 926 968 894	4 012 294 085	5 470 246 924	31 733 528
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 934 630 844	3 586 471 831	4 551 871 625	2 600 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		22 172 242 154	25 897 424 862	28 561 852 475	29 406 857 281

*) Data APBD

TABEL 2.13 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	13 343 358 327	15 157 460 004	16 828 153 995	22 026 201 874
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	8 212 800 641	9 916 358 231	10 904 825 813	13 810 924 605
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	6 716 170 095	8 213 117 978	9 090 677 397	12 054 424 421
1.2.	Retribusi Daerah Rebtributions	69 970 596	79 475 022	95 871 360	96 570 884
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	263 267 978	291 844 276	320 604 410	360 861 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	1 163 391 972	1 331 920 955	1 397 672 646	1 299 068 300
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	2 467 814 629	2 542 626 745	2 257 142 994	8 152 842 083
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	583 478 946	490 753 590	564 581 508	788 988 472
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	130 953 804	168 776 726	5 159 563	130 038 058
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 670 859 369	1 803 931 189	1 629 429 283	1 859 907 223
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	82 522 510	79 165 240	57 972 640	5 373 908 330
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	2 662 743 057	2 698 475 028	3 666 185 188	62 435 186
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 306 017 472	1 689 438 285	1 689 436 792	600 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		14 649 375 799	16 846 898 289	18 517 590 787	22 626 201 874

*) Data APBD

TABEL 2.14 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 583 056 764	3 139 871 880	3 400 014 812	3 921 068 617
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	1 216 102 750	1 464 604 954	1 593 110 770	1 553 180 369
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	1 063 314 118	1 291 664 421	1 397 772 210	1 377 156 183
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	38 043 014	44 595 095	45 811 954	36 998 728
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	40 817 517	48 247 880	52 502 632	57 398 373
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	73 928 101	80 097 558	97 023 974	81 627 085
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	957 561 851	1 013 811 390	1 021 886 268	1 768 771 681
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	89 148 689	70 324 850	60 016 641	108 842 557
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	5 582 494	6 431 380	2 240 865	59 740
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	828 334 768	899 923 550	920 544 722	940 835 434
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	34 495 900	37 131 610	39 084 040	719 033 950
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	409 392 163	661 455 536	785 017 774	599 116 567
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	403 200 659	389 527 178	511 093 118	405 923 579
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 986 257 423	3 529 399 058	3 911 107 930	4 326 992 196

*) Data APBD

TABEL 2.15 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.15 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	17 372 768 544	20 772 483 874	22 228 450 228	22 663 137 346
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	11 596 376 615	14 442 216 520	15 402 647 675	15 245 241 800
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	9 404 934 972	11 517 684 924	12 497 148 705	12 579 000 000
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	105 580 782	148 638 032	176 559 903	111 423 348
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	332 020 395	342 920 270	352 223 333	365 628 869
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	1 753 840 466	2 432 973 294	2 376 715 734	2 189 189 583
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	2 919 371 008	3 485 336 764	3 115 619 118	3 671 161 787
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	1 134 478 292	1 123 170 491	1 024 023 599	1 350 536 338
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	240 250 663	393 742 118	438 294 622	497 015 297
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 496 594 268	1 866 548 185	1 587 261 707	1 672 878 372
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	48 047 785	101 875 970	66 039 190	150 731 780
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	2 857 020 921	2 844 930 590	3 710 183 435	3 746 733 759
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 753 509 144	1 846 787 127	2 450 199 381	1 095 998 934
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		19 126 277 688	22 619 271 001	24 678 649 609	23 759 136 280

*) Data APBD

TABEL 2.16 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 230 229 814	7 068 432 912	7 328 220 769	8 005 287 474
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	4 118 551 716	4 899 125 741	4 972 737 619	5 242 329 551
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	3 943 816 592	4 624 337 476	4 686 574 138	4 985 941 800
1.2.	Retribusi Daerah Rebtributions	13 669 634	30 734 862	47 693 913	52 628 750
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	38 331 096	42 421 275	42 436 400	42 425 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	122 734 394	201 632 128	196 033 168	161 334 001
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 126 004 172	1 159 872 633	976 787 586	2 757 557 923
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	494 140 096	415 270 933	313 708 987	519 944 372
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	4 181 762	3 573 210	5 308 548	6 334 907
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	617 081 101	728 490 012	640 981 003	693 446 854
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	10 601 213	12 538 478	16 789 048	1 537 831 790
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	985 673 926	1 009 434 538	1 378 695 564	5 400 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	450 814 202	1 069 804 863	1 907 994 208	878 289 335
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		6 681 044 016	8 138 237 775	9 236 214 977	8 883 576 809

*) Data APBD

TABEL 2.17 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.17 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	4 109 377 804	4 577 678 391	4 967 966 967	5 619 450 480
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	2 529 976 146	2 920 416 698	3 041 298 422	3 379 078 508
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	2 202 392 551	2 517 432 372	2 571 035 791	3 049 734 778
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	32 012 802	71 324 628	59 882 722	47 227 412
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	106 105 514	89 747 348	105 388 683	107 653 904
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	189 465 279	241 912 350	304 991 226	174 462 414
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	980 714 800	1 018 431 009	1 070 197 148	1 946 340 453
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	131 057 469	144 532 786	104 103 309	153 658 479
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	13 456 075	0	0	0
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	792 365 876	832 297 473	831 597 268	850 144 224
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	43 835 380	41 600 750	134 496 571	942 537 750
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	598 686 858	638 830 684	856 471 397	294 031 519
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	899 202 574	1 039 709 937	905 741 327	415 678 970
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 008 580 378	5 617 388 328	5 873 708 294	6 035 129 450

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.18

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 379 593 701	2 789 427 242	3 448 585 632	3 576 520 815
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	858 454 205	1 115 060 397	1 374 165 767	1 384 517 817
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	697 834 322	904 783 591	1 010 655 242	1 015 124 279
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	12 917 378	19 838 517	24 357 011	27 218 391
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	52 715 118	55 670 167	63 229 182	114 508 662
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	94 987 387	134 768 122	275 924 332	227 666 485
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 075 004 986	1 212 086 447	1 450 695 265	1 565 970 194
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	148 645 947	149 750 882	134 132 452	168 514 089
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 598 323	27 281 795	13 671 946	24 310 276
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	859 353 026	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	57 407 690	54 663 430	214 257 150	255 454 120
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	446 134 510	462 280 398	623 724 600	626 032 804
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	28 134 779	13 828 458	198 747 835	30 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/ TOTAL		2 407 728 480	2 803 255 700	3 647 333 467	3 606 520 815

*) Data APBD

TABEL 2.19 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.19 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 393 070 440	2 787 588 697	3 315 669 415	3 876 020 088
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	528 832 134	763 337 478	882 315 240	966 858 995
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	363 720 612	559 803 346	662 667 383	721 405 576
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	8 589 942	18 408 844	32 888 198	32 225 453
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	53 317 241	63 445 963	71 557 012	86 252 500
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	103 204 339	121 679 325	115 202 647	126 975 466
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 165 848 623	1 282 745 347	1 461 922 423	2 864 659 141
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	83 417 371	74 913 781	56 298 222	77 824 623
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	616 889	1 908 066	4 523 616	4 695 260
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 003 991 703	1 131 687 590	1 300 445 875	1 337 091 848
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	77 822 660	74 235 910	100 654 710	1 445 047 410
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	698 389 683	741 505 872	971 431 752	44 501 952
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	245 944 915	235 104 724	254 559 323	82 570 469
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 639 015 355	3 022 693 421	3 570 228 738	3 958 590 557

*) Data APBD

TABEL 2.20 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 262 314 100	3 719 770 111	4 073 146 943	4 761 612 670
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	1 347 396 425	1 621 610 891	1 702 542 350	1 923 033 474
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	1 129 549 657	1 343 346 494	1 459 364 275	1 664 672 954
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	108 076 248	166 639 948	120 979 151	47 677 528
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	55 010 160	62 865 346	66 063 240	67 758 908
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	54 760 360	48 759 103	56 135 684	142 924 084
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 382 042 462	1 531 868 903	1 644 655 328	1 880 111 796
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	131 778 562	127 364 266	108 019 118	149 417 478
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	31 378 670	51 092 301	45 457 841	47 384 895
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 144 712 840	1 290 222 856	1 405 594 169	1 493 486 253
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	74 172 390	63 189 480	85 584 200	189 823 170
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	532 875 213	566 290 317	725 949 265	958 467 400
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	222 258 326	127 744 740	134 600 710	100 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 484 572 426	3 847 514 851	4 207 747 653	4 861 612 670

*) Data APBD

TABEL 2.21 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 809 096 139	3 129 694 746	3 252 747 574	4 235 177 751
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	1 093 821 486	1 253 708 122	1 174 969 267	1 698 067 100
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	973 244 830	1 087 630 498	1 019 293 669	1 343 651 768
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	7 371 574	9 065 199	9 674 080	9 959 107
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	25 298 652	29 760 680	37 075 680	40 900 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	87 906 430	127 251 745	108 925 838	303 556 225
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 442 477 674	1 557 416 499	1 673 376 687	2 073 020 216
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	169 674 606	144 812 235	117 308 743	199 081 760
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	146 986 818	198 245 696	202 946 136	306 730 763
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 062 516 940	1 152 428 738	1 280 595 848	1 294 850 243
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	63 299 310	61 929 830	72 525 960	272 357 450
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	272 796 979	318 570 125	404 401 620	464 090 435
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	559 334 316	386 719 707	294 181 384	136 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 368 430 455	3 516 414 453	3 546 928 958	4 371 177 751

*) Data APBD

TABEL 2.22 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	4 350 810 456	4 793 164 631	4 746 943 175	5 579 393 303
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	2 502 279 216	2 898 704 954	2 684 908 314	2 938 281 960
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	2 136 882 989	2 395 925 506	2 040 580 383	2 424 015 823
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	20 534 550	20 001 837	29 197 146	24 285 569
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	916 252	1 116 058	50 479 364	50 335 115
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	343 945 425	481 661 553	564 651 421	439 645 453
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 505 123 319	1 523 714 616	1 576 111 339	2 608 665 093
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	195 943 995	171 176 951	136 054 700	124 528 103
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	584 114 343	596 622 189	804 921 470	735 173 361
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	683 511 441	701 725 536	571 244 699	779 517 454
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	41 553 540	54 189 940	63 890 470	969 446 175
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	343 407 921	370 745 061	485 923 522	32 446 250
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 203 925 399	863 395 088	753 331 196	203 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 554 735 855	5 656 559 719	5 500 274 371	5 782 393 303

*) Data APBD

TABEL 2.23 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	11 631 697 052	11 285 828 192	9 376 312 818	10 296 924 310
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	5 885 262 004	6 663 113 275	4 861 546 726	5 089 508 170
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	4 929 791 599	5 429 125 999	3 753 718 936	4 012 255 300
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	33 676 707	15 494 253	14 733 943	12 996 200
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	291 684 072	309 599 926	230 816 058	289 251 210
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	630 109 626	908 893 097	862 277 789	775 005 460
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	5 335 759 150	4 253 320 982	4 024 025 055	5 186 846 140
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	825 858 411	662 727 209	639 155 369	883 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	4 446 313 563	3 532 243 333	3 166 218 336	3 212 361 151
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	55 539 336	57 312 515	0	80 402 179
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	8 047 840	1 037 925	218 651 350	1 011 082 810
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	410 675 898	369 393 935	490 741 037	20 570 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	3 198 903 975	1 050 356 119	0	800 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		14 830 601 027	12 336 184 311	9 376 312 818	11 096 924 310

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.24

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	0	1 513 352 878	1 444 382 660	1 978 279 905
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	0	11 833 885	370 047 613	320 047 453
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	0	0	305 736 943	309 797 453
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	0	0	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	0	11 833 885	64 310 670	10 250 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	0	1 228 625 713	910 439 345	1 653 232 452
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	0	104 848 110	86 580 489	79 799 690
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	1 094 988 347	112 663 608	229 642 913
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	0	20 567 986	651 247 428	1 032 459 159
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	8 221 270	59 947 820	311 330 690
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	272 893 280	163 895 702	5 000 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	0	313 461 401	1 184 448 976	905 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		0	1 826 814 279	2 628 831 636	2 883 279 905

*) Data APBD

TABEL 2.25 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.25 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 062 083 090	2 320 810 783	2 527 959 070	3 001 754 654
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	789 631 755	937 681 927	1 012 945 961	1 141 321 190
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	667 921 447	785 141 595	837 020 758	980 941 990
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	25 269 651	34 468 180	54 224 074	56 729 200
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	33 010 612	29 410 022	33 225 161	45 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	63 430 045	88 662 130	88 475 968	58 650 000
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 029 942 557	1 093 949 318	1 173 041 387	1 855 433 464
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	84 261 033	69 660 411	52 779 724	85 338 870
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	5 651 107	14 761 225	16 568 064	36 323 258
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	885 684 277	949 852 622	1 026 948 809	1 065 545 204
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	54 346 140	59 675 060	76 744 790	668 226 132
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	242 508 778	289 179 538	341 971 722	5 000 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	252 914 032	249 382 344	290 708 660	84 011 897
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 314 997 122	2 570 193 127	2 818 667 730	3 085 766 551

*) Data APBD

TABEL 2.26 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.26 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 132 935 005	2 440 226 816	2 901 587 582	3 312 288 836
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	662 226 616	824 611 352	904 937 124	1 004 414 626
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	555 077 910	663 633 353	738 993 197	872 034 820
1.2.	Retribusi Daerah Repayments	3 622 024	4 326 901	6 203 473	4 470 512
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	8 170 067	9 548 970	20 311 030	20 311 030
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	95 356 615	147 102 128	139 429 424	107 598 264
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 160 797 527	1 239 776 947	1 557 754 565	2 290 706 746
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	81 976 567	62 083 121	53 911 018	86 809 369
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	18 212 925	25 866 332	31 254 392	58 185 291
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	994 658 685	1 087 885 014	1 221 602 865	1 272 925 036
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	65 949 350	63 942 480	250 986 290	872 787 050
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	309 910 862	375 838 517	438 895 893	17 167 464
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	147 788 886	147 909 346	135 829 773	93 992 209
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 280 723 891	2 588 136 162	3 037 417 355	3 406 281 045

*) Data APBD

TABEL 2.27 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	4 867 592 610	5 503 161 406	6 105 815 095	6 851 571 778
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 560 045 632	3 029 122 239	3 270 828 511	3 511 644 272
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 253 427 933	2 667 266 553	2 902 245 606	3 145 435 142
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	60 528 671	94 595 827	94 314 412	86 711 162
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	71 057 299	74 599 105	88 982 067	92 584 717
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	175 031 729	192 660 754	185 286 426	186 913 251
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 422 165 817	1 531 386 241	1 590 754 389	2 101 018 129
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	256 812 149	218 129 274	170 370 403	256 711 515
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	11 317 890	30 681 746	17 687 427	25 080 783
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 089 771 438	1 209 598 741	1 180 010 167	1 394 148 361
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	64 264 340	72 976 480	222 686 392	425 077 470
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	885 381 161	942 652 926	1 244 232 195	1 238 909 377
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	149 803 013	339 681 251	309 744 921	50 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 017 395 623	5 842 842 657	6 415 560 016	6 901 571 778

*) Data APBD

TABEL 2.28 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.28 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 972 559 881	2 189 559 758	2 471 388 947	2 641 119 191
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	514 857 030	599 942 751	667 079 210	558 392 945
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	408 107 144	457 838 380	516 470 918	455 615 815
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	24 471 159	18 244 034	17 728 744	10 069 477
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	23 843 795	23 315 540	22 653 081	23 450 508
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	58 434 932	100 544 797	110 226 467	69 257 145
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 160 895 854	1 236 016 579	1 383 850 900	1 498 362 846
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	67 214 668	62 477 343	47 457 636	62 445 807
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	59 378 675	61 153 215	73 569 737	44 362 850
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	981 035 741	1 053 636 011	1 176 423 577	1 200 634 199
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	53 266 770	58 750 010	86 399 950	190 919 990
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	296 806 997	353 600 428	420 458 837	584 363 400
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	203 679 670	331 004 017	415 300 941	232 042 512
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 176 239 551	2 520 563 775	2 886 689 888	2 873 161 703

*) Data APBD

TABEL 2.29 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.29 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 052 625 775	1 209 049 489	1 389 324 213	1 682 037 856
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	214 684 375	281 920 210	289 557 151	349 144 606
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	200 883 464	247 137 061	260 996 262	319 889 262
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	571 212	1 967 050	4 072 218	5 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	0	1 946 292	3 181 275	4 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	13 229 699	30 869 807	21 307 396	20 255 344
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	722 098 488	800 313 829	934 046 394	1 292 589 010
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	26 408 286	22 554 272	18 908 874	27 059 663
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	392 411	1 106 059	1 857 909	1 987 054
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	652 284 261	734 279 438	845 395 651	884 557 753
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	43 013 530	42 374 060	67 883 960	378 984 540
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	115 842 912	126 815 450	165 720 668	40 304 240
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	101 032 865	92 443 365	87 002 816	13 329 155
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 153 658 640	1 301 492 854	1 476 327 029	1 695 367 011

*) Data APBD

TABEL 2.30 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 2.30 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 073 860 195	1 240 241 991	1 473 749 820	1 706 336 865
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	154 131 860	223 704 906	273 507 239	278 766 459
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	132 801 331	196 874 903	228 176 180	243 221 084
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	2 326 506	4 031 227	11 825 664	12 177 250
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	530 814	1 175 246	2 137 218	1 225 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	18 473 209	21 623 530	31 368 177	22 143 125
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	772 106 138	857 098 935	991 630 606	1 382 681 663
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	39 214 271	27 843 302	22 547 630	25 361 987
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	377 275	2 455 801	988 093	1 986 384
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	685 497 592	776 214 122	895 580 933	925 147 622
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	47 017 000	50 585 710	72 513 950	430 185 670
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	147 622 197	159 438 150	208 611 975	44 888 743
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	101 379 671	129 254 556	0	447 691 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 175 239 866	1 369 496 547	1 473 749 820	2 154 027 865

*) Data APBD

TABEL 2.31 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 545 464 676	1 823 030 023	2 132 588 500	2 479 133 963
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	304 364 506	425 425 608	390 813 372	527 230 635
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	217 800 853	279 566 231	296 851 529	332 765 414
1.2.	Retribusi Daerah Rebtributions	43 994 598	70 162 844	63 034 075	81 550 318
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	19 311 339	31 317 239	1 750 000	52 600 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	23 257 716	44 379 294	29 177 768	60 314 903
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	1 026 829 361	1 165 471 924	1 453 149 900	1 597 102 698
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	72 694 999	66 624 446	51 135 352	73 886 338
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	3 052 290	9 009 006	7 325 274	14 381 114
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	897 657 192	1 019 704 312	1 177 774 674	1 260 897 986
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	53 424 880	70 134 160	216 914 600	247 937 260
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	214 270 809	232 132 491	288 625 228	354 800 630
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	149 438 146	89 519 602	171 947 602	111 464 261
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 694 902 822	1 912 549 625	2 304 536 102	2 590 598 224

*) Data APBD

TABEL 2.32 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 315 899 116	1 508 577 673	1 801 248 263	2 241 173 725
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	165 886 908	203 059 698	236 054 154	282 996 628
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	137 782 856	145 451 712	172 771 593	182 764 996
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	16 604 423	41 852 324	50 092 679	65 767 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	170 360	634 494	0	700 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	11 329 269	15 121 168	13 189 882	33 764 132
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	940 667 169	1 089 674 339	1 303 829 596	1 542 692 977
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	50 805 123	44 229 087	37 981 605	62 581 797
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	47 582 504	64 198 612	57 983 593	76 009 493
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	772 591 162	906 623 550	1 061 177 950	1 132 578 857
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	69 688 380	74 623 090	146 686 448	271 522 830
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	209 345 039	215 843 636	261 364 513	415 484 120
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	125 225 151	24 141 586	54 882 268	112 345 211
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 441 124 267	1 532 719 259	1 856 130 531	2 353 518 936

*) Data APBD

TABEL 2.33 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 637 696 634	5 762 348 201	5 840 353 119	6 165 287 623
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah Original Local Government Revenue	236 282 890	306 674 697	322 799 298	316 276 910
1.1.	Pajak Daerah Local Taxes	184 122 827	229 610 362	230 413 878	244 822 500
1.2.	Retribusi Daerah Retributions	1 944 900	1 206 600	1 076 531	1 545 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	13 020 674	14 364 750	7 725 389	20 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah Other Original Local Gov. Revenue	37 194 489	61 492 985	83 583 500	49 909 410
2.	Dana Perimbangan Balanced Budget	2 992 755 350	2 783 645 235	2 496 263 895	2 931 845 630
2.1.	Bagi Hasil Pajak Tax Share	232 101 384	175 115 617	191 559 617	205 509 110
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non Tax Share/Natural Resources	1 630 850 129	1 425 049 229	928 248 703	870 072 851
2.3.	Dana Alokasi Umum General Allocation Funds	1 064 872 637	1 122 264 659	1 284 079 495	1 322 765 639
2.4.	Dana Alokasi Khusus Special Allocation Funds	64 931 200	61 215 730	92 376 080	533 498 030
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Legal Revenue	2 408 658 394	2 672 028 269	3 021 289 926	2 917 165 083
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	372 575 438	1 334 408 797	1 665 917 453	849 808 637
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		6 010 272 072	7 096 756 998	7 506 270 572	7 015 096 260

*) Data APBD

TABEL 2.34 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN**
TABLE **(ribu rupiah), 2013-2016**
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	8 361 139 391	10 709 818 950	11 805 767 353	8 912 515 550
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	597 707 375	944 929 692	912 908 312	528 011 870
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	453 677 291	566 062 615	633 391 996	338 627 032
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	24 524 172	57 091 739	49 085 469	39 811 660
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 792 803	32 942 178	15 932 454	52 560 183
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	93 713 109	288 833 160	214 498 393	97 012 995
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 511 020 686	2 643 812 997	3 256 235 610	2 872 601 512
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	287 065 667	244 216 931	196 894 225	132 000 012
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	200 789 929	287 888 085	321 105 167	477 981 740
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 889 267 850	1 991 202 341	2 277 932 698	2 085 374 200
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	133 897 240	120 505 640	460 303 520	177 245 560
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	5 252 411 330	7 121 076 261	7 636 623 431	5 511 902 168
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	768 415 821	833 202 864	1 180 864 548	0
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		9 129 555 212	11 543 021 814	12 986 631 901	8 912 515 550

*) Data APBD

TABEL

TABLE 3.

TABEL 3.A **REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	10 671 826 520	11 606 324 715	11 694 163 500	12 551 166 051
2.	Sumatera Utara	7 397 986 772	7 772 029 153	8 480 758 953	9 973 988 772
3.	Sumatera Barat	3 147 840 359	3 635 837 761	4 052 249 308	4 595 703 758
4.	R i a u	6 994 646 205	8 132 409 892	6 911 044 806	7 588 647 540
5.	J a m b i	2 886 305 068	3 165 055 793	3 129 718 818	3 441 962 713
6.	Sumatera Selatan	5 468 139 691	6 237 367 763	5 990 424 062	7 036 774 157
7.	Bengkulu	1 696 369 921	1 986 238 994	2 180 678 757	2 417 157 015
8.	Lampung	3 901 950 614	4 526 532 292	4 787 308 489	5 350 902 785
9.	Bangka Belitung	1 529 111 282	1 719 594 419	1 886 998 635	2 015 482 385
10.	Kepulauan Riau	2 843 717 790	2 919 185 332	2 513 438 254	3 026 806 719
11.	DKI Jakarta	39 517 544 012	43 824 300 561	44 209 238 168	59 004 784 464
12.	Jawa Barat	19 237 611 310	22 310 953 031	24 009 980 850	26 806 857 281
13.	Jawa Tengah	13 343 358 327	15 157 460 004	16 828 153 995	22 026 201 874
14.	D I Yogyakarta	2 583 056 764	3 139 871 880	3 400 014 812	3 921 068 617
15.	Jawa Timur	17 372 768 544	20 772 483 874	22 228 450 228	22 663 137 346
16.	Banten	6 230 229 814	7 068 432 912	7 328 220 769	8 005 287 474
17.	B a l i	4 109 377 804	4 577 678 391	4 967 966 967	5 619 450 480
18.	Nusa Tenggara Barat	2 379 593 701	2 789 427 242	3 448 585 632	3 576 520 815
19.	Nusa Tenggara Timur	2 393 070 440	2 787 588 697	3 315 669 415	3 876 020 088
20.	Kalimantan Barat	3 262 314 100	3 719 770 111	4 073 146 943	4 761 612 670
21.	Kalimantan Tengah	2 809 096 139	3 129 694 746	3 252 747 574	4 235 177 751
22.	Kalimantan Selatan	4 350 810 456	4 793 164 631	4 746 943 175	5 579 393 303
23.	Kalimantan Timur	11 631 697 052	11 285 828 192	9 376 312 818	10 296 924 310
24.	Kalimantan Utara	0	1 513 352 878	1 444 382 660	1 978 279 905
25.	Sulawesi Utara	2 062 083 090	2 320 810 783	2 527 959 070	3 001 754 654
26.	Sulawesi Tengah	2 132 935 005	2 440 226 816	2 901 587 582	3 312 288 836
27.	Sulawesi Selatan	4 867 592 610	5 503 161 406	6 105 815 095	6 851 571 778
28.	Sulawesi Tenggara	1 972 559 881	2 189 559 758	2 471 388 947	2 641 119 191
29.	Gorontalo	1 052 625 775	1 209 049 489	1 389 324 213	1 682 037 856
30.	Sulawesi Barat	1 073 860 195	1 240 241 991	1 473 749 820	1 706 336 865
31.	M a l u k u	1 545 464 676	1 823 030 023	2 132 588 500	2 479 133 963
32.	Maluku Utara	1 315 899 116	1 508 577 673	1 801 248 263	2 241 173 725
33.	Papua Barat	5 637 696 634	5 762 348 201	5 840 353 119	6 165 287 623
34.	P a p u a	8 361 139 391	10 709 818 950	11 805 767 353	8 912 515 550
JUMLAH/TOTAL		205 780 279 058	233 277 408 354	242 706 379 550	279 342 528 314

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2013-2016**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 325 435 091	1 731 130 840	1 985 835 617	2 057 481 533
2.	Sumatera Utara	4 091 285 887	4 416 811 865	4 883 880 619	4 630 468 148
3.	Sumatera Barat	1 366 178 102	1 729 222 284	1 876 733 122	1 894 690 226
4.	R i a u	2 725 623 913	3 245 087 745	3 476 960 098	3 495 548 893
5.	J a m b i	1 063 922 065	1 281 239 473	1 241 237 022	1 273 892 967
6.	Sumatera Selatan	2 021 696 787	2 407 905 239	2 534 526 413	2 733 329 641
7.	Bengkulu	525 207 935	672 064 468	701 300 383	745 385 298
8.	Lampung	1 771 297 935	2 274 685 573	2 247 342 668	2 446 043 678
9.	Bangka Belitung	495 796 075	562 928 837	571 802 890	567 635 350
10.	Kepulauan Riau	907 982 039	1 070 208 289	1 012 146 824	1 109 056 420
11.	DKI Jakarta	26 852 192 453	31 274 215 886	33 686 176 815	39 322 613 624
12.	Jawa Barat	12 360 109 870	15 038 153 310	16 032 856 414	16 180 205 532
13.	Jawa Tengah	8 212 800 641	9 916 358 231	10 904 825 813	13 810 924 605
14.	D I Yogyakarta	1 216 102 750	1 464 604 954	1 593 110 770	1 553 180 369
15.	Jawa Timur	11 596 376 615	14 442 216 520	15 402 647 675	15 245 241 800
16.	Banten	4 118 551 716	4 899 125 741	4 972 737 619	5 242 329 551
17.	B a l i	2 529 976 146	2 920 416 698	3 041 298 422	3 379 078 508
18.	Nusa Tenggara Barat	858 454 205	1 115 060 397	1 374 165 767	1 384 517 817
19.	Nusa Tenggara Timur	528 832 134	763 337 478	882 315 240	966 858 995
20.	Kalimantan Barat	1 347 396 425	1 621 610 891	1 702 542 350	1 923 033 474
21.	Kalimantan Tengah	1 093 821 486	1 253 708 122	1 174 969 267	1 698 067 100
22.	Kalimantan Selatan	2 502 279 216	2 898 704 954	2 684 908 314	2 938 281 960
23.	Kalimantan Timur	5 885 262 004	6 663 113 275	4 861 546 726	5 089 508 170
24.	Kalimantan Utara	0	11 833 885	370 047 613	320 047 453
25.	Sulawesi Utara	789 631 755	937 681 927	1 012 945 961	1 141 321 190
26.	Sulawesi Tengah	662 226 616	824 611 352	904 937 124	1 004 414 626
27.	Sulawesi Selatan	2 560 045 632	3 029 122 239	3 270 828 511	3 511 644 272
28.	Sulawesi Tenggara	514 857 030	599 942 751	667 079 210	558 392 945
29.	Gorontalo	214 684 375	281 920 210	289 557 151	349 144 606
30.	Sulawesi Barat	154 131 860	223 704 906	273 507 239	278 766 459
31.	M a l u k u	304 364 506	425 425 608	390 813 372	527 230 635
32.	Maluku Utara	165 886 908	203 059 698	236 054 154	282 996 628
33.	Papua Barat	236 282 890	306 674 697	322 799 298	316 276 910
34.	P a p u a	597 707 375	944 929 692	912 908 312	528 011 870
JUMLAH/ TOTAL		101 596 400 437	121 450 818 035	127 497 344 793	138 505 621 253

*) Data APBD

TABEL 3.1.1 **REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE 3.1.1 **ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	752 846 745	1 030 679 175	1 172 685 150	1 219 985 562
2.	Sumatera Utara	3 685 437 788	4 054 634 671	4 427 143 659	4 168 615 292
3.	Sumatera Barat	1 085 164 285	1 354 541 147	1 445 611 641	1 427 515 224
4.	R i a u	2 110 997 530	2 496 771 206	2 572 777 209	2 765 548 893
5.	J a m b i	841 884 452	1 010 560 585	1 010 318 980	1 062 315 000
6.	Sumatera Selatan	1 882 596 916	2 267 779 726	2 324 865 133	2 512 149 700
7.	Bengkulu	394 141 932	483 711 051	510 664 692	534 562 547
8.	Lampung	1 547 336 215	1 946 452 924	1 963 322 717	2 199 300 000
9.	Bangka Belitung	447 462 199	508 262 616	506 944 936	500 844 834
10.	Kepulauan Riau	852 188 093	1 006 068 104	951 535 874	1 040 848 920
11.	DKI Jakarta	23 370 213 237	27 050 949 024	29 076 926 598	32 010 000 000
12.	Jawa Barat	11 236 145 855	13 753 760 403	14 617 071 393	14 930 507 755
13.	Jawa Tengah	6 716 170 095	8 213 117 978	9 090 677 397	12 054 424 421
14.	D I Yogyakarta	1 063 314 118	1 291 664 421	1 397 772 210	1 377 156 183
15.	Jawa Timur	9 404 934 972	11 517 684 924	12 497 148 705	12 579 000 000
16.	Banten	3 943 816 592	4 624 337 476	4 686 574 138	4 985 941 800
17.	B a l i	2 202 392 551	2 517 432 372	2 571 035 791	3 049 734 778
18.	Nusa Tenggara Barat	697 834 322	904 783 591	1 010 655 242	1 015 124 279
19.	Nusa Tenggara Timur	363 720 612	559 803 346	662 667 383	721 405 576
20.	Kalimantan Barat	1 129 549 657	1 343 346 494	1 459 364 275	1 664 672 954
21.	Kalimantan Tengah	973 244 830	1 087 630 498	1 019 293 669	1 343 651 768
22.	Kalimantan Selatan	2 136 882 989	2 395 925 506	2 040 580 383	2 424 015 823
23.	Kalimantan Timur	4 929 791 599	5 429 125 999	3 753 718 936	4 012 255 300
24.	Kalimantan Utara	0	0	305 736 943	309 797 453
25.	Sulawesi Utara	667 921 447	785 141 595	837 020 758	980 941 990
26.	Sulawesi Tengah	555 077 910	663 633 353	738 993 197	872 034 820
27.	Sulawesi Selatan	2 253 427 933	2 667 266 553	2 902 245 606	3 145 435 142
28.	Sulawesi Tenggara	408 107 144	457 838 380	516 470 918	455 615 815
29.	Gorontalo	200 883 464	247 137 061	260 996 262	319 889 262
30.	Sulawesi Barat	132 801 331	196 874 903	228 176 180	243 221 084
31.	M a l u k u	217 800 853	279 566 231	296 851 529	332 765 414
32.	Maluku Utara	137 782 856	145 451 712	172 771 593	182 764 996
33.	Papua Barat	184 122 827	229 610 362	230 413 878	244 822 500
34.	P a p u a	453 677 291	566 062 615	633 391 996	338 627 032
JUMLAH/TOTAL		86 979 670 640	103 087 606 002	107 892 424 971	117 025 492 117

*) Data APBD

TABEL 3.1.2 **REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE 3.1.2 **ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/ Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 346 062	3 701 217	4 799 511	11 802 500
2.	Sumatera Utara	79 173 619	78 497 614	36 071 947	31 964 609
3.	Sumatera Barat	34 595 713	16 751 318	20 373 635	16 734 498
4.	R i a u	24 359 497	16 992 124	21 571 219	11 000 000
5.	J a m b i	15 363 759	14 587 181	19 336 664	20 609 509
6.	Sumatera Selatan	16 522 296	11 422 670	17 229 351	15 782 584
7.	Bengkulu	12 326 203	4 625 281	4 048 632	4 037 554
8.	Lampung	8 672 979	9 253 336	10 376 054	9 880 079
9.	Bangka Belitung	5 327 341	9 357 404	11 520 365	9 061 667
10.	Kepulauan Riau	13 413 198	2 713 029	2 013 340	3 062 500
11.	DKI Jakarta	333 787 344	515 162 936	459 459 498	800 000 000
12.	Jawa Barat	63 654 936	70 081 405	73 404 323	66 269 808
13.	Jawa Tengah	69 970 596	79 475 022	95 871 360	96 570 884
14.	D I Yogyakarta	38 043 014	44 595 095	45 811 954	36 998 728
15.	Jawa Timur	105 580 782	148 638 032	176 559 903	111 423 348
16.	Banten	13 669 634	30 734 862	47 693 913	52 628 750
17.	B a l i	32 012 802	71 324 628	59 882 722	47 227 412
18.	Nusa Tenggara Barat	12 917 378	19 838 517	24 357 011	27 218 391
19.	Nusa Tenggara Timur	8 589 942	18 408 844	32 888 198	32 225 453
20.	Kalimantan Barat	108 076 248	166 639 948	120 979 151	47 677 528
21.	Kalimantan Tengah	7 371 574	9 065 199	9 674 080	9 959 107
22.	Kalimantan Selatan	20 534 550	20 001 837	29 197 146	24 285 569
23.	Kalimantan Timur	33 676 707	15 494 253	14 733 943	12 996 200
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	25 269 651	34 468 180	54 224 074	56 729 200
26.	Sulawesi Tengah	3 622 024	4 326 901	6 203 473	4 470 512
27.	Sulawesi Selatan	60 528 671	94 595 827	94 314 412	86 711 162
28.	Sulawesi Tenggara	24 471 159	18 244 034	17 728 744	10 069 477
29.	Gorontalo	571 212	1 967 050	4 072 218	5 000 000
30.	Sulawesi Barat	2 326 506	4 031 227	11 825 664	12 177 250
31.	M a l u k u	43 994 598	70 162 844	63 034 075	81 550 318
32.	Maluku Utara	16 604 423	41 852 324	50 092 679	65 767 500
33.	Papua Barat	1 944 900	1 206 600	1 076 531	1 545 000
34.	P a p u a	24 524 172	57 091 739	49 085 469	39 811 660
JUMLAH/ TOTAL		1 267 843 490	1 705 308 478	1 689 511 259	1 863 248 757

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016

TABEL 3.1.3
TABLE **ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL GOVERNMENT CORPORATE AND MANAGEMENT OF SEPARATED REGIONAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	123 628 755	134 013 450	165 102 922	201 085 953
2.	Sumatera Utara	229 337 171	156 330 873	250 240 903	261 613 672
3.	Sumatera Barat	93 871 535	94 207 475	85 124 659	87 920 007
4.	R i a u	146 463 620	154 214 508	178 216 271	218 000 000
5.	J a m b i	26 879 028	32 219 309	33 956 073	33 503 058
6.	Sumatera Selatan	59 352 769	30 668 098	60 861 027	86 416 657
7.	Bengkulu	12 069 161	17 080 376	18 128 900	17 895 152
8.	Lampung	25 144 919	25 462 865	25 715 957	26 980 639
9.	Bangka Belitung	5 390 252	1 025 926	5 243 416	7 500 000
10.	Kepulauan Riau	2 559 183	0	3 740 233	0
11.	DKI Jakarta	397 234 722	465 979 963	527 280 486	790 000 000
12.	Jawa Barat	261 601 089	304 380 445	281 661 628	310 065 560
13.	Jawa Tengah	263 267 978	291 844 276	320 604 410	360 861 000
14.	D I Yogyakarta	40 817 517	48 247 880	52 502 632	57 398 373
15.	Jawa Timur	332 020 395	342 920 270	352 223 333	365 628 869
16.	Banten	38 331 096	42 421 275	42 436 400	42 425 000
17.	B a l i	106 105 514	89 747 348	105 388 683	107 653 904
18.	Nusa Tenggara Barat	52 715 118	55 670 167	63 229 182	114 508 662
19.	Nusa Tenggara Timur	53 317 241	63 445 963	71 557 012	86 252 500
20.	Kalimantan Barat	55 010 160	62 865 346	66 063 240	67 758 908
21.	Kalimantan Tengah	25 298 652	29 760 680	37 075 680	40 900 000
22.	Kalimantan Selatan	916 252	1 116 058	50 479 364	50 335 115
23.	Kalimantan Timur	291 684 072	309 599 926	230 816 058	289 251 210
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	33 010 612	29 410 022	33 225 161	45 000 000
26.	Sulawesi Tengah	8 170 067	9 548 970	20 311 030	20 311 030
27.	Sulawesi Selatan	71 057 299	74 599 105	88 982 067	92 584 717
28.	Sulawesi Tenggara	23 843 795	23 315 540	22 653 081	23 450 508
29.	Gorontalo	0	1 946 292	3 181 275	4 000 000
30.	Sulawesi Barat	530 814	1 175 246	2 137 218	1 225 000
31.	M a l u k u	19 311 339	31 317 239	1 750 000	52 600 000
32.	Maluku Utara	170 360	634 494	0	700 000
33.	Papua Barat	13 020 674	14 364 750	7 725 389	20 000 000
34.	P a p u a	25 792 803	32 942 178	15 932 454	52 560 183
JUMLAH/TOTAL		2 837 923 962	2 972 476 313	3 223 546 144	3 936 385 677

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.4

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH
SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV.
REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	442 613 529	562 736 998	643 248 034	624 607 518
2.	Sumatera Utara	97 337 309	127 348 707	170 424 110	168 274 575
3.	Sumatera Barat	152 546 569	263 722 344	325 623 187	362 520 497
4.	R i a u	443 803 266	577 109 907	704 395 399	501 000 000
5.	J a m b i	179 794 826	223 872 398	177 625 305	157 465 400
6.	Sumatera Selatan	63 224 806	98 034 745	131 570 902	118 980 700
7.	Bengkulu	106 670 639	166 647 760	168 458 159	188 890 045
8.	Lampung	190 143 822	293 516 448	247 927 940	209 882 960
9.	Bangka Belitung	37 616 283	44 282 891	48 094 173	50 228 849
10.	Kepulauan Riau	39 821 565	61 427 156	54 857 377	65 145 000
11.	DKI Jakarta	2 750 957 150	3 242 123 963	3 622 510 233	5 722 613 624
12.	Jawa Barat	798 707 990	909 931 057	1 060 719 070	873 362 409
13.	Jawa Tengah	1 163 391 972	1 331 920 955	1 397 672 646	1 299 068 300
14.	D I Yogyakarta	73 928 101	80 097 558	97 023 974	81 627 085
15.	Jawa Timur	1 753 840 466	2 432 973 294	2 376 715 734	2 189 189 583
16.	Banten	122 734 394	201 632 128	196 033 168	161 334 001
17.	B a l i	189 465 279	241 912 350	304 991 226	174 462 414
18.	Nusa Tenggara Barat	94 987 387	134 768 122	275 924 332	227 666 485
19.	Nusa Tenggara Timur	103 204 339	121 679 325	115 202 647	126 975 466
20.	Kalimantan Barat	54 760 360	48 759 103	56 135 684	142 924 084
21.	Kalimantan Tengah	87 906 430	127 251 745	108 925 838	303 556 225
22.	Kalimantan Selatan	343 945 425	481 661 553	564 651 421	439 645 453
23.	Kalimantan Timur	630 109 626	908 893 097	862 277 789	775 005 460
24.	Kalimantan Utara	0	11 833 885	64 310 670	10 250 000
25.	Sulawesi Utara	63 430 045	88 662 130	88 475 968	58 650 000
26.	Sulawesi Tengah	95 356 615	147 102 128	139 429 424	107 598 264
27.	Sulawesi Selatan	175 031 729	192 660 754	185 286 426	186 913 251
28.	Sulawesi Tenggara	58 434 932	100 544 797	110 226 467	69 257 145
29.	Gorontalo	13 229 699	30 869 807	21 307 396	20 255 344
30.	Sulawesi Barat	18 473 209	21 623 530	31 368 177	22 143 125
31.	M a l u k u	23 257 716	44 379 294	29 177 768	60 314 903
32.	Maluku Utara	11 329 269	15 121 168	13 189 882	33 764 132
33.	Papua Barat	37 194 489	61 492 985	83 583 500	49 909 410
34.	P a p u a	93 713 109	288 833 160	214 498 393	97 012 995
JUMLAH/TOTAL		10 510 962 345	13 685 427 242	14 691 862 419	15 680 494 702

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 675 448 212	2 551 683 310	1 561 778 473	1 670 711 099
2.	Sumatera Utara	1 710 602 556	1 812 638 981	1 521 253 168	2 272 745 765
3.	Sumatera Barat	1 240 879 867	1 333 059 018	1 390 876 415	2 649 114 355
4.	R i a u	3 610 182 230	4 231 808 634	2 548 627 473	4 085 273 647
5.	J a m b i	1 489 852 560	1 514 518 389	1 419 079 798	1 549 917 106
6.	Sumatera Selatan	2 649 216 454	2 982 866 001	2 329 728 331	2 713 196 347
7.	Bengkulu	977 347 954	1 104 582 676	1 208 985 365	1 655 168 591
8.	Lampung	1 384 043 537	1 472 486 569	1 514 291 529	1 821 186 563
9.	Bangka Belitung	907 835 915	1 025 142 797	1 130 400 495	1 263 220 635
10.	Kepulauan Riau	1 753 710 493	1 664 959 883	1 246 121 773	1 641 530 391
11.	DKI Jakarta	9 387 539 402	9 677 533 225	5 887 267 645	13 867 897 878
12.	Jawa Barat	2 950 532 546	3 260 505 636	2 506 877 512	10 594 918 221
13.	Jawa Tengah	2 467 814 629	2 542 626 745	2 257 142 994	8 152 842 083
14.	D I Yogyakarta	957 561 851	1 013 811 390	1 021 886 268	1 768 771 681
15.	Jawa Timur	2 919 371 008	3 485 336 764	3 115 619 118	3 671 161 787
16.	Banten	1 126 004 172	1 159 872 633	976 787 586	2 757 557 923
17.	B a l i	980 714 800	1 018 431 009	1 070 197 148	1 946 340 453
18.	Nusa Tenggara Barat	1 075 004 986	1 212 086 447	1 450 695 265	1 565 970 194
19.	Nusa Tenggara Timur	1 165 848 623	1 282 745 347	1 461 922 423	2 864 659 141
20.	Kalimantan Barat	1 382 042 462	1 531 868 903	1 644 655 328	1 880 111 796
21.	Kalimantan Tengah	1 442 477 674	1 557 416 499	1 673 376 687	2 073 020 216
22.	Kalimantan Selatan	1 505 123 319	1 523 714 616	1 576 111 339	2 608 665 093
23.	Kalimantan Timur	5 335 759 150	4 253 320 982	4 024 025 055	5 186 846 140
24.	Kalimantan Utara	0	1 228 625 713	910 439 345	1 653 232 452
25.	Sulawesi Utara	1 029 942 557	1 093 949 318	1 173 041 387	1 855 433 464
26.	Sulawesi Tengah	1 160 797 527	1 239 776 947	1 557 754 565	2 290 706 746
27.	Sulawesi Selatan	1 422 165 817	1 531 386 241	1 590 754 389	2 101 018 129
28.	Sulawesi Tenggara	1 160 895 854	1 236 016 579	1 383 850 900	1 498 362 846
29.	Gorontalo	722 098 488	800 313 829	934 046 394	1 292 589 010
30.	Sulawesi Barat	772 106 138	857 098 935	991 630 606	1 382 681 663
31.	M a l u k u	1 026 829 361	1 165 471 924	1 453 149 900	1 597 102 698
32.	Maluku Utara	940 667 169	1 089 674 339	1 303 829 596	1 542 692 977
33.	Papua Barat	2 992 755 350	2 783 645 235	2 496 263 895	2 931 845 630
34.	P a p u a	2 511 020 686	2 643 812 997	3 256 235 610	2 872 601 512
JUMLAH/TOTAL		64 834 193 347	68 882 788 511	61 588 703 775	101 279 094 232

*) Data APBD

TABEL 3.2.1 **REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE 3.2.1 **ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	254 514 663	77 430 824	205 970 244	225 938 766
2.	Sumatera Utara	424 244 826	380 468 139	313 793 086	485 325 624
3.	Sumatera Barat	131 404 781	132 678 673	94 446 104	164 008 171
4.	R i a u	618 581 036	668 492 187	756 114 293	877 343 077
5.	J a m b i	246 548 942	194 972 088	179 892 405	198 816 567
6.	Sumatera Selatan	572 654 634	548 897 750	578 423 875	788 752 758
7.	Bengkulu	53 933 686	50 653 058	36 006 730	82 573 641
8.	Lampung	145 424 014	142 641 117	105 182 867	156 586 924
9.	Bangka Belitung	60 622 259	52 839 392	47 461 054	62 470 427
10.	Kepulauan Riau	198 090 541	203 987 983	167 100 440	266 736 254
11.	DKI Jakarta	8 863 205 864	9 279 068 989	5 751 741 853	13 819 992 249
12.	Jawa Barat	1 026 017 163	1 076 897 693	906 645 388	1 329 526 525
13.	Jawa Tengah	583 478 946	490 753 590	564 581 508	788 988 472
14.	D I Yogyakarta	89 148 689	70 324 850	60 016 641	108 842 557
15.	Jawa Timur	1 134 478 292	1 123 170 491	1 024 023 599	1 350 536 338
16.	Banten	494 140 096	415 270 933	313 708 987	519 944 372
17.	B a l i	131 057 469	144 532 786	104 103 309	153 658 479
18.	Nusa Tenggara Barat	148 645 947	149 750 882	134 132 452	168 514 089
19.	Nusa Tenggara Timur	83 417 371	74 913 781	56 298 222	77 824 623
20.	Kalimantan Barat	131 778 562	127 364 266	108 019 118	149 417 478
21.	Kalimantan Tengah	169 674 606	144 812 235	117 308 743	199 081 760
22.	Kalimantan Selatan	195 943 995	171 176 951	136 054 700	124 528 103
23.	Kalimantan Timur	825 858 411	662 727 209	639 155 369	883 000 000
24.	Kalimantan Utara	0	104 848 110	86 580 489	79 799 690
25.	Sulawesi Utara	84 261 033	69 660 411	52 779 724	85 338 870
26.	Sulawesi Tengah	81 976 567	62 083 121	53 911 018	86 809 369
27.	Sulawesi Selatan	256 812 149	218 129 274	170 370 403	256 711 515
28.	Sulawesi Tenggara	67 214 668	62 477 343	47 457 636	62 445 807
29.	Gorontalo	26 408 286	22 554 272	18 908 874	27 059 663
30.	Sulawesi Barat	39 214 271	27 843 302	22 547 630	25 361 987
31.	M a l u k u	72 694 999	66 624 446	51 135 352	73 886 338
32.	Maluku Utara	50 805 123	44 229 087	37 981 605	62 581 797
33.	Papua Barat	232 101 384	175 115 617	191 559 617	205 509 110
34.	P a p u a	287 065 667	244 216 931	196 894 225	132 000 012
JUMLAH/TOTAL		17 781 418 940	17 481 607 781	13 330 307 560	24 079 911 412

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.2

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 253 339 521	1 199 685 909	47 047 187	25 650 844
2.	Sumatera Utara	8 088 878	23 310 178	20 451 831	30 591 978
3.	Sumatera Barat	5 610 600	16 385 839	12 570 605	10 700 000
4.	R i a u	2 226 231 958	2 698 594 353	1 074 930 738	1 015 827 790
5.	J a m b i	353 397 070	321 853 079	172 076 759	126 008 641
6.	Sumatera Selatan	1 180 856 653	1 385 670 591	749 983 666	694 574 028
7.	Bengkulu	17 179 110	44 907 411	63 004 615	81 902 438
8.	Lampung	117 848 110	144 940 791	66 912 823	57 317 167
9.	Bangka Belitung	85 902 968	122 110 799	140 696 182	163 684 860
10.	Kepulauan Riau	862 879 432	721 284 492	340 540 412	354 689 521
11.	DKI Jakarta	225 151 072	312 478 954	135 525 792	47 905 629
12.	Jawa Barat	371 990 322	417 706 527	277 673 745	270 941 625
13.	Jawa Tengah	130 953 804	168 776 726	5 159 563	130 038 058
14.	D I Yogyakarta	5 582 494	6 431 380	2 240 865	59 740
15.	Jawa Timur	240 250 663	393 742 118	438 294 622	497 015 297
16.	Banten	4 181 762	3 573 210	5 308 548	6 334 907
17.	B a l i	13 456 075	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	9 598 323	27 281 795	13 671 946	24 310 276
19.	Nusa Tenggara Timur	616 889	1 908 066	4 523 616	4 695 260
20.	Kalimantan Barat	31 378 670	51 092 301	45 457 841	47 384 895
21.	Kalimantan Tengah	146 986 818	198 245 696	202 946 136	306 730 763
22.	Kalimantan Selatan	584 114 343	596 622 189	804 921 470	735 173 361
23.	Kalimantan Timur	4 446 313 563	3 532 243 333	3 166 218 336	3 212 361 151
24.	Kalimantan Utara	0	1 094 988 347	112 663 608	229 642 913
25.	Sulawesi Utara	5 651 107	14 761 225	16 568 064	36 323 258
26.	Sulawesi Tengah	18 212 925	25 866 332	31 254 392	58 185 291
27.	Sulawesi Selatan	11 317 890	30 681 746	17 687 427	25 080 783
28.	Sulawesi Tenggara	59 378 675	61 153 215	73 569 737	44 362 850
29.	Gorontalo	392 411	1 106 059	1 857 909	1 987 054
30.	Sulawesi Barat	377 275	2 455 801	988 093	1 986 384
31.	M a l u k u	3 052 290	9 009 006	7 325 274	14 381 114
32.	Maluku Utara	47 582 504	64 198 612	57 983 593	76 009 493
33.	Papua Barat	1 630 850 129	1 425 049 229	928 248 703	870 072 851
34.	P a p u a	200 789 929	287 888 085	321 105 167	477 981 740
JUMLAH/TOTAL		14 299 514 233	15 406 003 394	9 359 409 265	9 679 911 960

*) Data APBD

TABEL 3.2.3 **REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE **ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 092 445 518	1 201 612 787	1 237 894 986	1 263 870 989
2.	Sumatera Utara	1 223 445 404	1 349 132 276	1 139 261 371	1 604 505 673
3.	Sumatera Barat	1 039 922 511	1 129 886 306	1 221 128 606	1 261 915 864
4.	R i a u	726 630 916	820 984 584	654 220 250	737 744 590
5.	J a m b i	836 578 062	948 337 712	1 009 165 864	1 070 452 478
6.	Sumatera Selatan	870 516 767	985 542 760	931 915 470	1 071 421 391
7.	Bengkulu	854 647 828	955 095 187	1 046 080 820	1 070 751 192
8.	Lampung	1 060 663 183	1 136 053 041	1 097 129 439	1 321 679 032
9.	Bangka Belitung	717 140 118	806 820 146	897 887 443	905 526 208
10.	Kepulauan Riau	656 067 610	698 009 318	695 943 711	866 810 696
11.	DKI Jakarta	299 182 466	85 985 282	0	0
12.	Jawa Barat	1 472 453 011	1 687 686 386	1 303 654 355	1 247 045 751
13.	Jawa Tengah	1 670 859 369	1 803 931 189	1 629 429 283	1 859 907 223
14.	D I Yogyakarta	828 334 768	899 923 550	920 544 722	940 835 434
15.	Jawa Timur	1 496 594 268	1 866 548 185	1 587 261 707	1 672 878 372
16.	Banten	617 081 101	728 490 012	640 981 003	693 446 854
17.	B a l i	792 365 876	832 297 473	831 597 268	850 144 224
18.	Nusa Tenggara Barat	859 353 026	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709
19.	Nusa Tenggara Timur	1 003 991 703	1 131 687 590	1 300 445 875	1 337 091 848
20.	Kalimantan Barat	1 144 712 840	1 290 222 856	1 405 594 169	1 493 486 253
21.	Kalimantan Tengah	1 062 516 940	1 152 428 738	1 280 595 848	1 294 850 243
22.	Kalimantan Selatan	683 511 441	701 725 536	571 244 699	779 517 454
23.	Kalimantan Timur	55 539 336	57 312 515	0	80 402 179
24.	Kalimantan Utara	0	20 567 986	651 247 428	1 032 459 159
25.	Sulawesi Utara	885 684 277	949 852 622	1 026 948 809	1 065 545 204
26.	Sulawesi Tengah	994 658 685	1 087 885 014	1 221 602 865	1 272 925 036
27.	Sulawesi Selatan	1 089 771 438	1 209 598 741	1 180 010 167	1 394 148 361
28.	Sulawesi Tenggara	981 035 741	1 053 636 011	1 176 423 577	1 200 634 199
29.	Gorontalo	652 284 261	734 279 438	845 395 651	884 557 753
30.	Sulawesi Barat	685 497 592	776 214 122	895 580 933	925 147 622
31.	M a l u k u	897 657 192	1 019 704 312	1 177 774 674	1 260 897 986
32.	Maluku Utara	772 591 162	906 623 550	1 061 177 950	1 132 578 857
33.	Papua Barat	1 064 872 637	1 122 264 659	1 284 079 495	1 322 765 639
34.	P a p u a	1 889 267 850	1 991 202 341	2 277 932 698	2 085 374 200
JUMLAH/TOTAL		30 977 874 897	34 121 932 565	35 288 784 853	38 119 009 673

*) Data APBD

TABEL 3.2.4 **REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE 3.2.4 **ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	75 148 510	72 953 790	70 866 056	155 250 500
2.	Sumatera Utara	54 823 448	59 728 388	47 746 880	152 322 490
3.	Sumatera Barat	63 941 975	54 108 200	62 731 100	1 212 490 320
4.	R i a u	38 738 320	43 737 510	63 362 192	1 454 358 190
5.	J a m b i	53 328 486	49 355 510	57 944 770	154 639 420
6.	Sumatera Selatan	25 188 400	62 754 900	69 405 320	158 448 170
7.	Bengkulu	51 587 330	53 927 020	63 893 200	419 941 320
8.	Lampung	60 108 230	48 851 620	245 066 400	285 603 440
9.	Bangka Belitung	44 170 570	43 372 460	44 355 816	131 539 140
10.	Kepulauan Riau	36 672 910	41 678 090	42 537 210	153 293 920
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	80 072 050	78 215 030	18 904 024	7 747 404 320
13.	Jawa Tengah	82 522 510	79 165 240	57 972 640	5 373 908 330
14.	D I Yogyakarta	34 495 900	37 131 610	39 084 040	719 033 950
15.	Jawa Timur	48 047 785	101 875 970	66 039 190	150 731 780
16.	Banten	10 601 213	12 538 478	16 789 048	1 537 831 790
17.	B a l i	43 835 380	41 600 750	134 496 571	942 537 750
18.	Nusa Tenggara Barat	57 407 690	54 663 430	214 257 150	255 454 120
19.	Nusa Tenggara Timur	77 822 660	74 235 910	100 654 710	1 445 047 410
20.	Kalimantan Barat	74 172 390	63 189 480	85 584 200	189 823 170
21.	Kalimantan Tengah	63 299 310	61 929 830	72 525 960	272 357 450
22.	Kalimantan Selatan	41 553 540	54 189 940	63 890 470	969 446 175
23.	Kalimantan Timur	8 047 840	1 037 925	218 651 350	1 011 082 810
24.	Kalimantan Utara	0	8 221 270	59 947 820	311 330 690
25.	Sulawesi Utara	54 346 140	59 675 060	76 744 790	668 226 132
26.	Sulawesi Tengah	65 949 350	63 942 480	250 986 290	872 787 050
27.	Sulawesi Selatan	64 264 340	72 976 480	222 686 392	425 077 470
28.	Sulawesi Tenggara	53 266 770	58 750 010	86 399 950	190 919 990
29.	Gorontalo	43 013 530	42 374 060	67 883 960	378 984 540
30.	Sulawesi Barat	47 017 000	50 585 710	72 513 950	430 185 670
31.	M a l u k u	53 424 880	70 134 160	216 914 600	247 937 260
32.	Maluku Utara	69 688 380	74 623 090	146 686 448	271 522 830
33.	Papua Barat	64 931 200	61 215 730	92 376 080	533 498 030
34.	P a p u a	133 897 240	120 505 640	460 303 520	177 245 560
JUMLAH/ TOTAL		1 775 385 277	1 873 244 771	3 610 202 097	29 400 261 187

*) Data APBD

TABEL 3.3 REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE *ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016*

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 670 943 217	7 323 510 565	8 146 549 410	8 822 973 419
2.	Sumatera Utara	1 596 098 329	1 542 578 307	2 075 625 166	3 070 774 859
3.	Sumatera Barat	540 782 390	573 556 459	784 639 771	51 899 177
4.	R i a u	658 840 062	655 513 513	885 457 235	7 825 000
5.	J a m b i	332 530 443	369 297 931	469 401 998	618 152 640
6.	Sumatera Selatan	797 226 450	846 596 523	1 126 169 318	1 590 248 169
7.	Bengkulu	193 814 032	209 591 850	270 393 009	16 603 126
8.	Lampung	746 609 142	779 360 150	1 025 674 292	1 083 672 544
9.	Bangka Belitung	125 479 292	131 522 785	184 795 250	184 626 400
10.	Kepulauan Riau	182 025 258	184 017 160	255 169 657	276 219 908
11.	DKI Jakarta	3 277 812 157	2 872 551 450	4 635 793 708	5 814 272 962
12.	Jawa Barat	3 926 968 894	4 012 294 085	5 470 246 924	31 733 528
13.	Jawa Tengah	2 662 743 057	2 698 475 028	3 666 185 188	62 435 186
14.	D I Yogyakarta	409 392 163	661 455 536	785 017 774	599 116 567
15.	Jawa Timur	2 857 020 921	2 844 930 590	3 710 183 435	3 746 733 759
16.	Banten	985 673 926	1 009 434 538	1 378 695 564	5 400 000
17.	B a l i	598 686 858	638 830 684	856 471 397	294 031 519
18.	Nusa Tenggara Barat	446 134 510	462 280 398	623 724 600	626 032 804
19.	Nusa Tenggara Timur	698 389 683	741 505 872	971 431 752	44 501 952
20.	Kalimantan Barat	532 875 213	566 290 317	725 949 265	958 467 400
21.	Kalimantan Tengah	272 796 979	318 570 125	404 401 620	464 090 435
22.	Kalimantan Selatan	343 407 921	370 745 061	485 923 522	32 446 250
23.	Kalimantan Timur	410 675 898	369 393 935	490 741 037	20 570 000
24.	Kalimantan Utara	0	272 893 280	163 895 702	5 000 000
25.	Sulawesi Utara	242 508 778	289 179 538	341 971 722	5 000 000
26.	Sulawesi Tengah	309 910 862	375 838 517	438 895 893	17 167 464
27.	Sulawesi Selatan	885 381 161	942 652 926	1 244 232 195	1 238 909 377
28.	Sulawesi Tenggara	296 806 997	353 600 428	420 458 837	584 363 400
29.	Gorontalo	115 842 912	126 815 450	165 720 668	40 304 240
30.	Sulawesi Barat	147 622 197	159 438 150	208 611 975	44 888 743
31.	M a l u k u	214 270 809	232 132 491	288 625 228	354 800 630
32.	Maluku Utara	209 345 039	215 843 636	261 364 513	415 484 120
33.	Papua Barat	2 408 658 394	2 672 028 269	3 021 289 926	2 917 165 083
34.	P a p u a	5 252 411 330	7 121 076 261	7 636 623 431	5 511 902 168
JUMLAH/TOTAL		39 349 685 274	42 943 801 808	53 620 330 982	39 557 812 829

*) Data APBD

TABEL 3.B REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE *ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA*
(thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 968 699 122	1 399 323 697	916 943 238	328 465 896
2.	Sumatera Utara	14 107 542	51 426 062	14 897 906	1 123 954
3.	Sumatera Barat	276 750 267	240 276 961	274 104 643	228 500 000
4.	R i a u	1 978 312 715	1 451 086 907	3 981 811 287	3 383 426 462
5.	J a m b i	690 767 077	514 103 467	474 526 425	300 060 345
6.	Sumatera Selatan	521 334 563	10 179 492	39 970 123	150 000 000
7.	Bengkulu	241 356 037	210 176 309	255 524 824	92 339 845
8.	Lampung	23 710 615	41 141 205	111 474 702	98 750 000
9.	Bangka Belitung	285 022 225	201 966 080	325 653 645	423 700 774
10.	Kepulauan Riau	514 289 374	538 524 513	136 340 165	30 000 000
11.	DKI Jakarta	9 463 721 531	7 593 994 776	9 209 781 909	8 163 357 322
12.	Jawa Barat	2 934 630 844	3 586 471 831	4 551 871 625	2 600 000 000
13.	Jawa Tengah	1 306 017 472	1 689 438 285	1 689 436 792	600 000 000
14.	D I Yogyakarta	403 200 659	389 527 178	511 093 118	405 923 579
15.	Jawa Timur	1 753 509 144	1 846 787 127	2 450 199 381	1 095 998 934
16.	Banten	450 814 202	1 069 804 863	1 907 994 208	878 289 335
17.	B a l i	899 202 574	1 039 709 937	905 741 327	415 678 970
18.	Nusa Tenggara Barat	28 134 779	13 828 458	198 747 835	30 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	245 944 915	235 104 724	254 559 323	82 570 469
20.	Kalimantan Barat	222 258 326	127 744 740	134 600 710	100 000 000
21.	Kalimantan Tengah	559 334 316	386 719 707	294 181 384	136 000 000
22.	Kalimantan Selatan	1 203 925 399	863 395 088	753 331 196	203 000 000
23.	Kalimantan Timur	3 198 903 975	1 050 356 119	0	800 000 000
24.	Kalimantan Utara	0	313 461 401	1 184 448 976	905 000 000
25.	Sulawesi Utara	252 914 032	249 382 344	290 708 660	84 011 897
26.	Sulawesi Tengah	147 788 886	147 909 346	135 829 773	93 992 209
27.	Sulawesi Selatan	149 803 013	339 681 251	309 744 921	50 000 000
28.	Sulawesi Tenggara	203 679 670	331 004 017	415 300 941	232 042 512
29.	Gorontalo	101 032 865	92 443 365	87 002 816	13 329 155
30.	Sulawesi Barat	101 379 671	129 254 556	0	447 691 000
31.	M a l u k u	149 438 146	89 519 602	171 947 602	111 464 261
32.	Maluku Utara	125 225 151	24 141 586	54 882 268	112 345 211
33.	Papua Barat	372 575 438	1 334 408 797	1 665 917 453	849 808 637
34.	P a p u a	768 415 821	833 202 864	1 180 864 548	0
JUMLAH/ TOTAL		31 556 200 366	28 435 496 655	34 889 433 724	23 446 870 767

*) Data APBD

TABEL

TABLE 4.

TABEL 4 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		109 747 735 878	123 757 686 233	143 155 765 704	163 490 438 349
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	28 592 924 382	30 925 017 579	38 807 912 341	46 286 207 590
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	35 990 508	45 111 554	61 277 821	96 237 226
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	25 717 306	31 757 432	694 262 769	1 666 089 576
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	35 964 403 377	33 018 207 958	39 957 250 083	49 867 423 156
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	2 267 140 617	1 640 604 334	3 029 787 495	3 496 986 057
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	22 612 403 925	31 842 794 308	32 794 183 403	38 567 750 004
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	20 047 554 907	26 086 116 602	27 729 825 183	22 822 088 808
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	201 600 856	168 076 466	81 266 609	687 655 932
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		94 000 696 054	95 577 183 625	103 885 713 143	125 268 379 070
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	7 873 832 502	7 216 339 267	6 429 833 490	6 982 785 341
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	49 557 469 337	51 521 457 321	52 297 824 333	61 389 254 575
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	36 569 394 215	36 839 387 037	45 158 055 320	56 896 339 154
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		33 588 047 492	42 378 035 151	30 554 334 427	14 030 581 662
JUMLAH/ TOTAL		237 336 479 424	261 712 905 009	277 595 813 274	302 789 399 081

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.1

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		3 464 270 270	5 580 074 906	5 643 598 833	6 044 601 009
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	819 274 025	870 169 543	899 104 777	1 004 355 901
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 219 682 993	693 008 973	643 933 200	1 044 155 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	292 533 440	309 012 899	250 088 300	247 234 200
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	269 719 474	298 490 577	503 280 080	659 792 090
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	801 680 060	3 407 472 166	3 343 547 380	3 045 563 418
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	61 380 278	1 920 748	3 645 096	43 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		7 756 157 285	6 465 772 436	6 505 823 422	6 830 030 938
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	487 041 503	364 456 742	435 005 438	466 054 639
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	5 618 995 231	3 703 813 328	4 045 714 495	3 781 561 104
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 650 120 551	2 397 502 366	2 025 103 489	2 582 415 195
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 420 098 087	959 801 070	461 684 483	5 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		12 640 525 642	13 005 648 412	12 611 106 738	12 879 631 947

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		5 004 403 323	5 371 411 832	5 886 083 698	7 059 489 325
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	924 490 865	1 008 161 979	1 055 299 207	1 371 733 360
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 825 737 597	1 611 718 257	2 094 026 766	3 022 816 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	43 718 380	1 065 000	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	522 121 373	1 692 809 639	2 330 828 370	2 478 630 055
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 687 837 008	1 053 174 611	405 929 355	178 809 910
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	498 100	4 482 346	0	7 500 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 256 064 927	2 437 145 478	2 073 083 486	2 891 355 120
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	167 575 793	144 540 209	151 092 148	175 532 064
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 327 766 717	1 146 633 041	989 746 989	1 472 525 876
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	760 722 417	1 145 972 228	932 244 349	1 243 297 180
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		151 626 064	14 897 905	536 489 675	24 268 281
JUMLAH/ TOTAL		7 412 094 314	7 823 455 215	8 495 656 859	9 975 112 726

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 668 156 981	1 831 872 717	2 359 421 523	2 661 076 523
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	562 989 640	598 043 410	672 707 253	741 678 407
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	572 705 110	591 642 080	894 816 808	1 087 322 800
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	28 909 462	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	416 913 494	546 614 466	669 370 829	664 893 368
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	85 739 275	94 969 449	122 483 415	150 731 948
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	900 000	603 312	43 218	16 450 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 445 156 684	1 651 799 638	1 662 835 437	2 113 127 235
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	117 827 070	116 677 136	100 029 258	14 954 451
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	635 840 015	749 234 578	774 656 224	934 074 100
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	691 489 599	785 887 924	788 149 955	1 164 098 684
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		311 276 961	392 442 367	304 096 991	50 000 000
JUMLAH/ TOTAL		3 424 590 626	3 876 114 722	4 326 353 951	4 824 203 758

*) Data APBD

TABEL
TABLE

4.4

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		3 292 872 527	3 431 470 705	4 133 737 638	5 388 349 772
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	877 503 081	937 258 185	979 663 542	1 202 953 391
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	4 999 254	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	1 251 675 819	751 853 825	936 850 423	1 293 607 024
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	20 887 500	13 015 000	855 180	10 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	874 713 339	1 614 630 539	1 233 314 138	1 283 579 949
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	263 093 534	114 713 156	983 054 355	1 580 209 408
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	0	0	0	18 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		4 232 409 979	2 170 603 791	3 627 234 830	5 583 724 230
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	319 820 084	188 187 847	215 518 119	340 557 333
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	1 667 282 867	1 358 771 642	1 397 229 026	2 711 043 123
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	2 245 307 028	623 644 302	2 014 487 685	2 532 123 774
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 447 676 414	3 981 422 303	3 131 883 625	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		8 972 958 920	9 583 496 799	10 892 856 093	10 972 074 002

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.5

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 271 925 809	1 483 115 535	1 762 391 117	1 738 498 553
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	434 868 794	480 217 430	552 244 225	607 547 808
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	335 646 046	380 761 572	622 071 193	633 863 200
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	33 441 017	19 518 750	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	315 495 683	462 356 647	467 708 760	481 755 700
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	150 386 797	138 550 780	119 320 829	10 231 845
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 087 472	1 710 356	1 046 110	5 100 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 738 815 356	1 721 517 300	1 663 174 974	2 003 524 505
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	98 333 655	90 004 993	110 945 007	149 339 146
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	702 495 631	813 453 043	760 927 878	766 805 438
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	937 986 070	818 059 264	791 302 089	1 087 379 921
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		566 330 980	474 526 425	178 679 152	0
JUMLAH/ TOTAL		3 577 072 145	3 679 159 260	3 604 245 243	3 742 023 058

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.6

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		3 683 194 508	4 010 626 533	3 108 721 120	3 534 278 040
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	731 001 398	752 819 177	776 889 350	443 160 626
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	2 031 305 992	1 574 378 204	1 638 104 118	2 091 384 379
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	399 597	513 384	380 000	600 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	115 227 612	268 508 790	115 950 085	181 505 921
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	804 677 610	1 413 549 040	576 359 567	812 627 114
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	582 299	857 938	1 038 000	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 995 509 103	1 760 106 497	2 081 477 692	2 229 365 348
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	58 351 300	23 441 741	5 368 504	5 947 638
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 074 254 135	1 005 053 067	1 035 087 257	981 543 245
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	862 903 668	731 611 689	1 041 021 931	1 241 874 465
C. PEMBIAYAAN DAERAH		310 770 643	476 814 225	840 195 373	1 423 130 769
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		5 989 474 254	6 247 547 255	6 030 394 185	7 186 774 157

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.7

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		795 311 582	908 754 313	1 069 307 495	1 095 847 870
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	425 728 526	450 265 493	493 881 157	549 288 966
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	209 507 795	225 782 948	361 930 070	276 363 800
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	142 626 514	211 055 929	211 928 326	239 965 745
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	15 627 639	21 144 500	1 567 942	21 729 359
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 821 108	505 443	0	8 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		931 694 776	1 025 967 285	1 213 037 385	1 395 855 598
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	90 923 857	96 977 553	107 604 273	126 557 221
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	563 392 939	623 936 194	626 251 826	680 601 214
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	277 377 980	305 053 538	479 181 286	588 697 163
C. PEMBIAYAAN DAERAH		210 719 600	261 693 705	153 858 701	17 793 392
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		1 937 725 958	2 196 415 303	2 436 203 581	2 509 496 860

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.8

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 811 879 220	2 144 560 815	2 584 515 351	3 129 958 412
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	497 662 948	544 114 850	700 857 892	833 658 220
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	761 045 629	847 424 324	1 092 450 979	1 125 000 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	5 448 514	4 521 800	6 409 900	6 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	357 471 263	723 095 813	762 543 531	1 100 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	170 214 409	20 173 866	22 253 049	31 750 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	20 036 457	5 230 162	0	33 550 192
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 072 655 734	2 309 626 502	2 196 686 698	2 229 444 373
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	100 476 762	109 214 896	90 380 434	103 174 826
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 168 089 647	1 274 956 923	1 237 307 069	1 059 030 949
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	804 089 325	925 454 683	868 999 195	1 067 238 598
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		41 126 275	113 486 180	117 581 142	90 250 000
JUMLAH/ TOTAL		3 925 661 229	4 567 673 497	4 898 783 191	5 449 652 785

*) Data APBD

TABEL
TABLE

4.9

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		808 318 501	855 780 981	1 080 851 837	1 305 793 510
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	246 900 473	274 339 635	312 375 890	406 293 418
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	3 000 000
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	220 160 776	167 022 783	257 790 335	278 268 677
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	2 611 950	745 500	666 700	1 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	177 383 056	212 859 717	303 413 475	245 671 793
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	161 262 246	200 796 461	206 510 261	369 559 622
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	0	16 885	95 176	2 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		801 348 925	740 305 877	789 106 649	1 133 389 649
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	79 233 302	70 712 734	81 446 273	111 621 355
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	319 349 046	364 039 655	473 942 523	680 980 654
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	402 766 577	305 553 488	233 717 853	340 787 640
C. PEMBIAYAAN DAERAH		204 466 081	325 473 641	342 693 794	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		1 814 133 507	1 921 560 499	2 212 652 280	2 439 183 159

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.10

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 195 146 662	1 213 820 569	1 219 616 966	1 437 351 868
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	220 943 360	252 064 813	281 351 911	323 882 438
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	365 873 250	470 786 270	485 780 546	380 981 019
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	134 215 225	40 688 431	58 079 160	22 910 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	283 495 455	252 894 344	315 613 621	670 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	188 604 802	197 356 711	78 215 728	36 578 411
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 014 570	30 000	576 000	3 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 520 685 847	2 098 638 305	1 385 777 170	1 619 454 851
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	189 822 416	183 736 097	163 651 073	208 662 720
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	937 953 666	1 196 907 727	880 841 202	1 002 810 707
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	392 909 765	717 994 481	341 284 895	407 981 424
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		642 174 655	145 250 971	44 384 283	0
JUMLAH/ TOTAL		3 358 007 164	3 457 709 845	2 649 778 419	3 056 806 719

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.11

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		13 148 602 086	12 631 884 602	20 707 205 013	25 562 945 426
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10 046 180 477	10 472 324 237	15 866 062 897	18 715 193 048
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	2 191 752	1 218 529	5 478 640	30 000 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	659 081 781	1 612 726 276
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 999 968 587	1 462 044 387	1 717 428 916	2 550 498 855
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	1 044 598 130	680 155 340	2 087 123 200	2 524 193 425
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	44 286 271	14 005 707	371 152 504	1 818 004
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	11 376 869	2 136 402	877 075	128 515 818
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		25 152 900 311	25 167 779 696	22 324 117 934	34 382 577 360
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 815 488 704	2 132 264 555	1 446 281 119	1 575 091 994
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	12 641 399 413	12 624 396 751	10 633 820 106	16 624 523 868
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	10 696 012 194	10 411 118 390	10 244 016 709	16 182 961 498
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		10 679 763 146	13 618 631 039	10 387 697 130	7 222 619 000
JUMLAH/ TOTAL		48 981 265 543	51 418 295 337	53 419 020 077	67 168 141 786

*) Data APBD

TABEL 4.12 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS
TABLE PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		14 724 113 008	16 958 816 394	19 256 280 146	21 755 509 507
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 535 932 802	1 569 541 693	1 671 229 143	2 104 513 145
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 940 521	6 805 400	18 990 870	15 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	5 673 020 648	6 179 782 846	6 826 862 952	9 658 666 533
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	13 600 215	2 871 320	3 048 750	19 456 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	3 994 277 232	5 461 539 028	6 406 192 658	6 384 562 828
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	3 504 341 590	3 738 146 028	4 329 955 773	3 523 311 001
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	130 079	0	50 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		3 672 632 315	3 839 172 071	5 161 325 715	6 847 772 774
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	426 605 110	304 590 204	223 252 161	271 904 077
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 973 247 376	2 174 779 252	2 639 397 429	3 029 926 425
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 272 779 829	1 359 802 615	2 298 676 125	3 545 942 272
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		3 775 496 831	5 099 436 397	4 144 246 614	803 575 000
JUMLAH/TOTAL		22 172 242 154	25 897 424 862	28 561 852 475	29 406 857 281

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.13

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		9 213 696 623	10 646 904 181	12 396 063 966	16 039 277 550
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 368 517 191	1 726 640 884	2 186 704 012	2 935 693 127
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	3 499 864 177	2 963 856 035	3 745 182 609	5 359 325 200
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	14 362 375	23 281 040	18 715 300	41 650 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 825 598 247	3 263 403 899	4 130 087 481	5 356 597 095
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	2 503 166 398	2 661 510 573	2 303 371 333	2 299 344 378
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 188 235	8 211 750	12 003 231	46 667 750
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		3 511 079 685	4 439 160 853	5 424 696 529	6 386 924 324
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	373 147 586	470 795 604	294 192 183	376 107 634
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	2 143 191 579	2 397 685 838	2 615 822 791	2 863 293 876
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	994 740 520	1 570 679 411	2 514 681 555	3 147 522 814
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 924 599 491	1 760 833 255	696 830 292	200 000 000
JUMLAH/TOTAL		14 649 375 799	16 846 898 289	18 517 590 787	22 626 201 874

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.14

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 440 462 297	1 560 157 356	1 810 940 127	2 070 916 317
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	491 077 276	512 498 971	540 817 462	632 402 209
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	437 147 781	441 914 970	562 260 179	768 176 098
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	12 509 469	9 919 078	7 073 500	4 683 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	376 702 291	472 309 827	583 092 613	561 340 599
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	123 025 480	121 560 575	117 696 373	91 814 411
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	1 953 935	0	12 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 069 181 078	1 420 910 964	1 685 485 375	2 119 075 879
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	143 754 843	111 425 291	128 727 296	150 710 364
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	556 030 441	867 039 199	929 155 893	1 020 959 720
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	369 395 794	442 446 474	627 602 186	947 405 795
C. PEMBIAYAAN DAERAH		476 614 048	548 330 738	414 682 428	137 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 986 257 423	3 529 399 058	3 911 107 930	4 326 992 196

*) Data APBD

TABEL 4.15 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.15 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		10 689 813 108	13 700 106 993	15 074 834 724	15 394 673 504
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	1 620 351 902	1 623 569 154	1 805 820 309	2 891 277 026
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	5 108 753	3 921 186	2 761 252	1 787 995
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	4 903 476 408	4 673 473 427	5 412 737 369	5 504 707 600
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	32 672 903	8 434 380	8 130 227	10 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	3 081 718 245	4 934 876 836	4 667 452 412	5 230 830 339
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	986 232 679	2 362 512 570	3 149 506 610	1 656 070 544
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	60 252 218	93 319 440	28 426 545	100 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		6 048 844 119	6 306 212 284	7 871 472 846	7 656 129 443
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	1 070 076 913	656 587 346	662 267 949	625 129 744
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	3 803 016 160	4 442 168 317	4 950 884 825	4 797 425 073
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	1 175 751 046	1 207 456 621	2 258 320 072	2 233 574 626
C. PEMBIAYAAN DAERAH		2 387 620 461	2 612 951 724	1 732 342 039	708 333 333
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		19 126 277 688	22 619 271 001	24 678 649 609	23 759 136 280

*) Data APBD

TABEL 4.16 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS
TABLE PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		3 316 069 657	4 013 607 703	4 758 963 213	5 201 735 268
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	423 141 044	481 328 441	544 637 409	651 528 843
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 331 719 638	1 244 666 640	1 500 205 771	1 847 838 600
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	36 185 650	86 602 000	131 217 500	152 040 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 334 273 510	1 764 024 523	1 920 559 281	1 978 572 522
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	190 749 815	436 986 099	657 845 799	536 755 303
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	4 497 453	35 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 979 069 495	2 178 547 864	3 325 176 946	3 609 341 541
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	181 862 098	144 776 980	156 935 313	159 567 244
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	983 932 220	1 342 286 491	1 732 271 926	1 719 249 707
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	813 275 177	691 484 393	1 435 969 707	1 730 524 590
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 385 904 864	1 946 082 208	1 152 074 818	72 500 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		6 681 044 016	8 138 237 775	9 236 214 977	8 883 576 809

*) Data APBD

TABEL 4.17 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.17 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 607 826 785	3 151 101 687	3 483 142 655	4 266 910 141
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	624 347 012	715 280 041	733 564 306	941 091 191
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	3 999 800	10 000 000	9 819 600	10 000 000
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	689 580 542	867 202 764	809 295 976	1 218 244 014
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	144 236 452	147 024 713	151 729 625	179 542 785
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	671 432 090	910 123 410	1 088 091 712	1 149 555 167
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	472 642 328	497 128 613	690 452 391	753 476 984
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	1 588 561	4 342 146	189 045	15 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 260 913 651	1 340 543 869	1 515 888 269	1 681 222 769
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	41 906 917	62 150 385	83 696 356	102 527 199
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	764 537 190	907 808 176	869 956 280	773 741 640
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	454 469 544	370 585 308	562 235 633	804 953 930
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 139 839 942	1 125 742 772	874 677 370	86 996 540
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		5 008 580 378	5 617 388 328	5 873 708 294	6 035 129 450

*) Data APBD

TABEL 4.18 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.18 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 482 172 654	1 558 834 866	1 731 408 033	1 946 919 426
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	472 165 454	502 984 121	564 302 754	648 449 201
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	197 768	248 496	0	0
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	669 157 984	536 698 599	686 038 528	749 481 363
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	55 886 880	25 477 063	30 622 895	33 648 890
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	215 435 740	454 803 323	435 441 046	477 787 961
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	67 117 173	38 517 986	12 762 278	26 621 051
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	2 211 655	105 278	2 240 532	10 930 960
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		897 421 047	1 055 265 236	1 633 495 638	1 628 576 568
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	81 597 916	89 028 411	121 707 586	131 099 471
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	365 543 941	543 439 395	677 203 973	809 514 110
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	450 279 190	422 797 430	834 584 079	687 962 987
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		28 134 779	189 155 598	282 429 796	31 024 821
JUMLAH/ TOTAL		2 407 728 480	2 803 255 700	3 647 333 467	3 606 520 815

*) Data APBD

TABEL 4.19 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.19 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 590 293 920	1 734 235 032	2 044 792 233	2 439 587 700
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	439 173 808	464 325 697	506 293 029	566 465 571
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	960 359 791	932 596 147	1 171 350 214	1 458 913 750
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	29 518 270	22 191 490	20 957 580	21 830 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	141 657 476	267 099 625	317 680 998	357 699 134
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	15 209 207	29 252 565	27 459 614	24 679 245
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	4 375 368	18 769 508	1 050 798	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		791 017 156	958 813 561	1 283 703 881	1 459 002 857
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	105 220 376	77 667 705	90 070 776	107 314 681
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	460 616 404	473 545 067	586 930 890	655 805 837
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	225 180 376	407 600 789	606 702 215	695 882 339
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		257 704 279	329 644 828	241 732 624	60 000 000
JUMLAH/ TOTAL		2 639 015 355	3 022 693 421	3 570 228 738	3 958 590 557

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.20

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 764 246 629	2 064 408 105	2 615 246 070	2 939 925 698
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	441 182 327	546 771 365	644 818 816	726 716 129
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	598 994 336	666 837 274	802 457 462	1 035 101 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	948 000	252 000	1 895 000	720 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	455 946 490	435 940 603	845 411 837	824 209 145
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	267 175 476	414 606 863	320 662 955	348 179 024
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 532 360 118	1 588 506 036	1 508 390 153	1 841 686 972
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	143 022 608	151 348 580	149 317 200	119 271 421
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	898 826 047	946 938 051	990 530 746	1 078 297 471
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	490 511 463	490 219 405	368 542 207	644 118 080
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		187 965 679	194 600 710	84 111 430	80 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 484 572 426	3 847 514 851	4 207 747 653	4 861 612 670

*) Data APBD

TABEL 4.21 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 361 950 809	1 485 025 739	1 649 116 750	1 957 338 274
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	346 955 356	385 757 112	434 769 090	591 832 571
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	13 579 963	13 704 956	1 779 018	1 163 300
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	289 034 924	332 463 903	604 198 436	534 956 586
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	59 366 720	69 886 615	67 090 690	64 509 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	485 973 440	527 398 945	372 558 292	753 738 017
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	165 887 728	154 846 272	165 953 964	4 700 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 152 678	967 936	2 767 260	6 438 800
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 566 774 812	1 750 774 460	1 833 317 047	2 267 236 977
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	67 960 906	71 273 654	139 076 929	164 048 005
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	558 211 280	864 992 982	735 098 575	909 060 532
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	940 602 626	814 507 824	959 141 543	1 194 128 440
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		439 704 834	280 614 254	64 495 161	146 602 500
JUMLAH/ TOTAL		3 368 430 455	3 516 414 453	3 546 928 958	4 371 177 751

*) Data APBD

TABEL 4.22 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.22 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 056 784 526	2 242 236 096	2 434 410 881	2 647 254 598
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	518 257 961	592 656 846	637 628 355	714 191 115
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	411 285 086	412 026 386	669 242 425	656 601 800
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	239 550	1 325 000	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 088 250 666	1 195 304 364	1 092 049 850	1 267 997 281
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	36 878 830	38 419 519	33 505 812	1 464 402
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 872 433	2 503 981	1 984 439	7 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 693 290 021	2 675 591 544	2 668 454 369	3 107 138 705
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	175 877 019	141 220 680	166 567 850	105 506 983
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 177 554 354	1 267 486 876	1 280 154 128	1 499 967 337
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 339 858 648	1 266 883 988	1 221 732 391	1 501 664 385
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		804 661 308	738 732 079	397 409 121	28 000 000
JUMLAH/ TOTAL		5 554 735 855	5 656 559 719	5 500 274 371	5 782 393 303

*) Data APBD

TABEL 4.23 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.23 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		7 103 434 642	6 414 604 671	4 251 297 752	5 809 876 200
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	779 583 156	930 549 933	943 304 357	1 052 777 951
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	1 567 763 966	909 317 897	966 801 166	1 171 123 100
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	3 940 000	4 249 500	4 419 500	5 954 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	2 692 808 046	2 563 201 309	2 440 676	2 098 380 349
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	2 059 339 474	2 005 786 032	2 330 897 807	1 461 640 800
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	0	1 500 000	3 434 246	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		6 676 810 264	4 859 951 094	4 347 690 549	5 287 048 110
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	568 035 669	494 060 058	311 271 403	408 100 427
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	2 457 642 779	2 154 573 721	2 025 501 327	2 188 351 275
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	3 651 131 816	2 211 317 315	2 010 917 819	2 690 596 408
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 050 356 121	1 061 628 546	777 324 517	0
JUMLAH/ TOTAL		14 830 601 027	12 336 184 311	9 376 312 818	11 096 924 310

*) Data APBD

TABEL 4.24 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		0	141 231 908	708 397 786	1 141 309 655
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	46 206 963	109 924 600	312 963 303
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	18 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	94 624 945	248 342 543	231 935 200
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	5 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	83 619 643	157 377 652
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	0	266 011 000	406 033 500
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	400 000	500 000	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		0	501 133 396	1 185 199 377	1 591 970 250
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	35 906 166	92 740 579	143 192 675
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	0	240 588 072	423 849 113	713 272 455
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	0	224 639 158	668 609 685	735 505 120
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		0	1 184 448 975	735 234 473	150 000 000
JUMLAH/ TOTAL		0	1 826 814 279	2 628 831 636	2 883 279 905

*) Data APBD

TABEL 4.25 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
TABLE 4.25 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		921 771 690	1 141 016 762	1 409 339 276	1 595 459 576
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	395 525 193	467 712 987	521 408 422	594 381 103
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	998 580	1 182 650	1 200 000
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	262 920 572	294 610 568	548 284 694	552 620 200
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	5 230 000	12 316 500	300 000	410 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	256 177 100	293 834 637	327 901 116	425 568 273
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	899 998	69 957 386	9 833 144	11 280 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	1 018 827	1 586 104	429 250	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 103 819 186	1 088 467 705	1 283 744 512	1 465 306 975
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	70 928 416	35 073 022	22 775 699	32 286 410
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	645 754 385	546 671 365	503 691 768	688 552 669
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	387 136 385	506 723 318	757 277 045	744 467 896
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		289 406 246	340 708 660	125 583 942	25 000 000
JUMLAH/ TOTAL		2 314 997 122	2 570 193 127	2 818 667 730	3 085 766 551

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.26

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		942 898 008	1 167 333 262	1 526 076 325	1 658 344 359
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	350 485 761	376 699 998	531 258 852	671 388 581
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	328 963 444	363 244 679	578 491 677	612 038 500
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	3 116 500	4 124 500	2 025 000	2 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	194 496 854	305 162 965	307 534 979	356 144 474
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	65 745 494	117 267 144	106 638 838	14 272 804
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	89 955	833 976	126 979	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 202 329 811	1 278 327 985	1 427 204 358	1 738 736 686
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	140 508 898	148 177 160	143 934 108	129 115 338
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	706 301 866	853 319 017	840 745 925	1 050 878 039
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	355 519 047	276 831 808	442 524 325	558 743 309
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		135 496 072	142 474 915	84 136 672	9 200 000
JUMLAH/TOTAL		2 280 723 891	2 588 136 162	3 037 417 355	3 406 281 045

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.27

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		3 193 410 492	3 446 840 488	3 798 198 140	4 207 954 370
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	736 658 019	852 198 957	913 334 508	1 036 006 939
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	8 715 554	16 151 416	28 158 983	39 500 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 028 773 966	950 682 805	1 221 910 000	1 324 050 600
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	843 117 427	1 101 354 583	1 175 949 066	1 383 430 648
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	572 441 642	525 489 443	458 845 583	400 217 642
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 703 884	963 284	0	24 748 541
B. BELANJA LANGSUNG		1 730 806 859	2 153 546 288	2 351 406 402	2 507 617 408
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	186 117 682	168 276 411	188 238 513	199 108 535
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 054 475 228	1 309 032 668	1 313 862 831	1 439 629 854
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	490 213 949	676 237 209	849 305 058	868 879 019
C. PEMBIAYAAN DAERAH		93 178 272	242 455 881	265 955 474	186 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		5 017 395 623	5 842 842 657	6 415 560 016	6 901 571 778

*) Data APBD

TABEL 4.28 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 060 331 581	1 114 072 138	1 235 549 809	1 524 728 989
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	431 361 209	458 968 695	491 167 574	566 193 352
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	18 329 792	22 627 810	21 128 245	18 548 815
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	295 628 063	324 556 946	419 566 403	584 663 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	214 814 429	203 217 978	217 328 398	242 118 442
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	96 245 018	104 700 709	86 359 189	87 951 109
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 953 070	0	0	25 253 871
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		752 613 024	974 527 586	1 113 724 658	1 244 033 513
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	62 484 468	58 057 283	55 814 254	55 862 026
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	259 411 676	362 977 173	374 401 879	385 932 663
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	430 716 880	553 493 130	683 508 525	802 238 824
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		363 294 946	431 964 051	537 415 421	104 399 201
JUMLAH/ TOTAL		2 176 239 551	2 520 563 775	2 886 689 888	2 873 161 703

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.29

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		506 042 855	558 125 330	620 104 488	805 470 914
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	224 332 890	239 795 987	269 685 980	305 120 707
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	171 421 290	181 553 544	204 002 311	325 973 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	556 000	1 479 000	3 006 000	2 487 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	78 238 394	112 638 502	122 823 973	144 732 722
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	31 158 408	21 600 082	18 135 176	22 156 585
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	335 873	1 058 215	2 451 048	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		544 773 920	646 364 708	787 826 560	888 396 097
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	36 434 870	35 278 153	52 049 234	49 765 304
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	323 379 712	378 661 812	391 533 251	459 914 290
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	184 959 338	232 424 743	344 244 075	378 716 503
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		102 841 865	97 002 816	68 395 981	1 500 000
JUMLAH/ TOTAL		1 153 658 640	1 301 492 854	1 476 327 029	1 695 367 011

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.30

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		438 697 989	507 606 860	490 231 734	815 724 123
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	200 211 221	210 732 942	239 971 271	257 365 687
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	2 876 292	5 842 468
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	158 222 764	173 152 932	233 733 427	388 165 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	122 400	11 125 744	13 650 744	12 006 531
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	51 538 654	112 595 242	0	116 188 424
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	28 337 950	0	0	35 156 013
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	265 000	0	0	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		605 373 178	719 815 524	895 610 256	1 336 303 742
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	34 830 232	0	129 750	8 193 165
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	387 091 610	452 797 262	450 252 488	497 426 169
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	183 451 336	267 018 262	445 228 018	830 684 408
C. PEMBIAYAAN DAERAH		131 168 699	142 074 163	87 907 830	2 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		1 175 239 866	1 369 496 547	1 473 749 820	2 154 027 865

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.31

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		939 228 838	830 868 693	1 069 228 383	1 142 976 279
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	360 075 315	392 741 104	466 045 470	535 402 579
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 644 657	1 192 613	874 409	557 948
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	459 681 993	306 012 795	388 797 248	370 083 458
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	4 992 696	2 016 380	11 945 863	13 272 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	91 395 308	102 848 334	183 231 747	197 180 282
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	19 008 296	24 215 570	16 407 977	18 980 012
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 430 573	1 841 897	1 925 669	7 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		637 219 990	895 264 571	1 210 862 620	1 413 386 060
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	64 172 558	30 606 186	5 970 209	8 553 154
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	379 456 442	495 328 479	662 106 967	715 552 804
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	193 590 990	369 329 906	542 785 444	689 280 102
C. PEMBIAYAAN DAERAH		118 453 994	186 416 361	24 445 099	34 235 885
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		1 694 902 822	1 912 549 625	2 304 536 102	2 590 598 224

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.32

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		591 900 918	560 913 095	754 110 831	831 712 359
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	215 957 878	265 437 989	334 290 451	386 872 697
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	3 408 850	5 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	315 975 829	196 660 633	262 402 128	309 203 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	26 406 259	15 042 365	11 856 100	7 600 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	33 534 852	83 272 108	129 990 936	102 136 262
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	0	11 220 596	18 900 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	26 100	500 000	941 770	2 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		795 692 214	920 652 250	1 054 649 285	1 509 806 577
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	69 715 759	77 207 847	107 589 459	97 443 471
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	336 245 301	415 479 700	523 567 485	666 948 887
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	389 731 154	427 964 703	423 492 341	745 414 219
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		53 531 135	51 153 914	47 370 415	12 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 441 124 267	1 532 719 259	1 856 130 531	2 353 518 936

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.33

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 577 912 070	2 876 703 562	3 502 393 797	3 521 030 124
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	172 542 175	178 580 573	207 475 746	340 099 117
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	467 016 555	463 623 362	514 552 922	569 541 900
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	38 319 893	35 295 750	44 192 000	29 730 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	777 049 506	713 746 670	1 180 116 277	890 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 120 101 441	1 485 457 207	1 556 056 852	1 681 659 107
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 882 500	0	0	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 934 518 145	2 552 145 929	3 377 772 879	3 409 063 504
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	128 783 417	136 216 566	135 607 772	159 691 893
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	972 065 646	1 224 141 281	1 565 161 033	1 776 375 687
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	833 669 082	1 191 788 082	1 677 004 074	1 472 995 924
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 497 841 857	1 667 907 507	626 103 896	85 002 632
JUMLAH/ TOTAL		6 010 272 072	7 096 756 998	7 506 270 572	7 015 096 260

*) Data APBD

TABEL 4.34 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
TABLE PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		5 080 595 310	6 419 561 804	6 980 187 994	4 817 613 110
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	657 545 845	744 258 374	919 022 324	623 729 863
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	651 084 026	732 224 238	835 350 289	851 750 900
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	178 167 170	88 453 792	94 308 781	78 508 726
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	232 800 665	280 781 136	290 677 197	105 807 767
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	3 348 440 831	4 562 248 919	4 829 851 734	3 157 815 854
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	12 556 773	11 595 345	10 977 669	0
B. BELANJA LANGSUNG		3 090 757 039	3 884 225 042	5 416 259 242	1 860 752 132
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	175 893 795	196 401 072	190 579 265	100 792 733
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	1 694 118 393	1 998 521 178	2 360 218 215	953 677 777
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	1 220 744 851	1 689 302 792	2 865 461 762	806 281 622
C. PEMBIAYAAN DAERAH		958 202 863	1 239 234 968	590 184 665	2 234 150 308
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		9 129 555 212	11 543 021 814	12 986 631 901	8 912 515 550

*) Data APBD

TABEL

TABLE 5.

TABEL
TABLE 5.A

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 464 270 270	5 580 074 906	5 643 598 833	6 044 601 009
2.	Sumatera Utara	5 004 403 323	5 371 411 832	5 886 083 698	7 059 489 325
3.	Sumatera Barat	1 668 156 981	1 831 872 717	2 359 421 523	2 661 076 523
4.	R i a u	3 292 872 527	3 431 470 705	4 133 737 638	5 388 349 772
5.	J a m b i	1 271 925 809	1 483 115 535	1 762 391 117	1 738 498 553
6.	Sumatera Selatan	3 683 194 508	4 010 626 533	3 108 721 120	3 534 278 040
7.	Bengkulu	795 311 582	908 754 313	1 069 307 495	1 095 847 870
8.	Lampung	1 811 879 220	2 144 560 815	2 584 515 351	3 129 958 412
9.	Bangka Belitung	808 318 501	855 780 981	1 080 851 837	1 305 793 510
10.	Kepulauan Riau	1 195 146 662	1 213 820 569	1 219 616 966	1 437 351 868
11.	DKI Jakarta	13 148 602 086	12 631 884 602	20 707 205 013	25 562 945 426
12.	Jawa Barat	14 724 113 008	16 958 816 394	19 256 280 146	21 755 509 507
13.	Jawa Tengah	9 213 696 623	10 646 904 181	12 396 063 966	16 039 277 550
14.	D I Yogyakarta	1 440 462 297	1 560 157 356	1 810 940 127	2 070 916 317
15.	Jawa Timur	10 689 813 108	13 700 106 993	15 074 834 724	15 394 673 504
16.	Banten	3 316 069 657	4 013 607 703	4 758 963 213	5 201 735 268
17.	B a l i	2 607 826 785	3 151 101 687	3 483 142 655	4 266 910 141
18.	Nusa Tenggara Barat	1 482 172 654	1 558 834 866	1 731 408 033	1 946 919 426
19.	Nusa Tenggara Timur	1 590 293 920	1 734 235 032	2 044 792 233	2 439 587 700
20.	Kalimantan Barat	1 764 246 629	2 064 408 105	2 615 246 070	2 939 925 698
21.	Kalimantan Tengah	1 361 950 809	1 485 025 739	1 649 116 750	1 957 338 274
22.	Kalimantan Selatan	2 056 784 526	2 242 236 096	2 434 410 881	2 647 254 598
23.	Kalimantan Timur	7 103 434 642	6 414 604 671	4 251 297 752	5 809 876 200
24.	Kalimantan Utara	0	141 231 908	708 397 786	1 141 309 655
25.	Sulawesi Utara	921 771 690	1 141 016 762	1 409 339 276	1 595 459 576
26.	Sulawesi Tengah	942 898 008	1 167 333 262	1 526 076 325	1 658 344 359
27.	Sulawesi Selatan	3 193 410 492	3 446 840 488	3 798 198 140	4 207 954 370
28.	Sulawesi Tenggara	1 060 331 581	1 114 072 138	1 235 549 809	1 524 728 989
29.	Gorontalo	506 042 855	558 125 330	620 104 488	805 470 914
30.	Sulawesi Barat	438 697 989	507 606 860	490 231 734	815 724 123
31.	M a l u k u	939 228 838	830 868 693	1 069 228 383	1 142 976 279
32.	Maluku Utara	591 900 918	560 913 095	754 110 831	831 712 359
33.	Papua Barat	2 577 912 070	2 876 703 562	3 502 393 797	3 521 030 124
34.	P a p u a	5 080 595 310	6 419 561 804	6 980 187 994	4 817 613 110
JUMLAH/TOTAL		109 747 735 878	123 757 686 233	143 155 765 704	163 490 438 349

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.A.1

**REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	819 274 025	870 169 543	899 104 777	1 004 355 901
2.	Sumatera Utara	924 490 865	1 008 161 979	1 055 299 207	1 371 733 360
3.	Sumatera Barat	562 989 640	598 043 410	672 707 253	741 678 407
4.	R i a u	877 503 081	937 258 185	979 663 542	1 202 953 391
5.	J a m b i	434 868 794	480 217 430	552 244 225	607 547 808
6.	Sumatera Selatan	731 001 398	752 819 177	776 889 350	443 160 626
7.	Bengkulu	425 728 526	450 265 493	493 881 157	549 288 966
8.	Lampung	497 662 948	544 114 850	700 857 892	833 658 220
9.	Bangka Belitung	246 900 473	274 339 635	312 375 890	406 293 418
10.	Kepulauan Riau	220 943 360	252 064 813	281 351 911	323 882 438
11.	DKI Jakarta	10 046 180 477	10 472 324 237	15 866 062 897	18 715 193 048
12.	Jawa Barat	1 535 932 802	1 569 541 693	1 671 229 143	2 104 513 145
13.	Jawa Tengah	1 368 517 191	1 726 640 884	2 186 704 012	2 935 693 127
14.	D I Yogyakarta	491 077 276	512 498 971	540 817 462	632 402 209
15.	Jawa Timur	1 620 351 902	1 623 569 154	1 805 820 309	2 891 277 026
16.	Banten	423 141 044	481 328 441	544 637 409	651 528 843
17.	B a l i	624 347 012	715 280 041	733 564 306	941 091 191
18.	Nusa Tenggara Barat	472 165 454	502 984 121	564 302 754	648 449 201
19.	Nusa Tenggara Timur	439 173 808	464 325 697	506 293 029	566 465 571
20.	Kalimantan Barat	441 182 327	546 771 365	644 818 816	726 716 129
21.	Kalimantan Tengah	346 955 356	385 757 112	434 769 090	591 832 571
22.	Kalimantan Selatan	518 257 961	592 656 846	637 628 355	714 191 115
23.	Kalimantan Timur	779 583 156	930 549 933	943 304 357	1 052 777 951
24.	Kalimantan Utara	0	46 206 963	109 924 600	312 963 303
25.	Sulawesi Utara	395 525 193	467 712 987	521 408 422	594 381 103
26.	Sulawesi Tengah	350 485 761	376 699 998	531 258 852	671 388 581
27.	Sulawesi Selatan	736 658 019	852 198 957	913 334 508	1 036 006 939
28.	Sulawesi Tenggara	431 361 209	458 968 695	491 167 574	566 193 352
29.	Gorontalo	224 332 890	239 795 987	269 685 980	305 120 707
30.	Sulawesi Barat	200 211 221	210 732 942	239 971 271	257 365 687
31.	M a l u k u	360 075 315	392 741 104	466 045 470	535 402 579
32.	Maluku Utara	215 957 878	265 437 989	334 290 451	386 872 697
33.	Papua Barat	172 542 175	178 580 573	207 475 746	340 099 117
34.	P a p u a	657 545 845	744 258 374	919 022 324	623 729 863
JUMLAH/TOTAL		28 592 924 382	30 925 017 579	38 807 912 341	46 286 207 590

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABEL 5.A.2 ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	2 191 752	1 218 529	5 478 640	30 000 000
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	5 108 753	3 921 186	2 761 252	1 787 995
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
26.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
27.	Sulawesi Selatan	8 715 554	16 151 416	28 158 983	39 500 000
28.	Sulawesi Tenggara	18 329 792	22 627 810	21 128 245	18 548 815
29.	Gorontalo	0	0	0	0
30.	Sulawesi Barat	0	0	2 876 292	5 842 468
31.	M a l u k u	1 644 657	1 192 613	874 409	557 948
32.	Maluku Utara	0	0	0	0
33.	Papua Barat	0	0	0	0
34.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		35 990 508	45 111 554	61 277 821	96 237 226

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABEL 5.A.3 ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	4 999 254	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	3 000 000
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	659 081 781	1 612 726 276
12.	Jawa Barat	2 940 521	6 805 400	18 990 870	15 000 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	3 999 800	10 000 000	9 819 600	10 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	197 768	248 496	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	13 579 963	13 704 956	1 779 018	1 163 300
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	18 000 000
25.	Sulawesi Utara	0	998 580	1 182 650	1 200 000
26.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
27.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
28.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
29.	Gorontalo	0	0	0	0
30.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
31.	M a l u k u	0	0	0	0
32.	Maluku Utara	0	0	3 408 850	5 000 000
33.	Papua Barat	0	0	0	0
34.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		25 717 306	31 757 432	694 262 769	1 666 089 576

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABEL 5.A.4 ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 219 682 993	693 008 973	643 933 200	1 044 155 400
2.	Sumatera Utara	1 825 737 597	1 611 718 257	2 094 026 766	3 022 816 000
3.	Sumatera Barat	572 705 110	591 642 080	894 816 808	1 087 322 800
4.	R i a u	1 251 675 819	751 853 825	936 850 423	1 293 607 024
5.	J a m b i	335 646 046	380 761 572	622 071 193	633 863 200
6.	Sumatera Selatan	2 031 305 992	1 574 378 204	1 638 104 118	2 091 384 379
7.	Bengkulu	209 507 795	225 782 948	361 930 070	276 363 800
8.	Lampung	761 045 629	847 424 324	1 092 450 979	1 125 000 000
9.	Bangka Belitung	220 160 776	167 022 783	257 790 335	278 268 677
10.	Kepulauan Riau	365 873 250	470 786 270	485 780 546	380 981 019
11.	DKI Jakarta	1 999 968 587	1 462 044 387	1 717 428 916	2 550 498 855
12.	Jawa Barat	5 673 020 648	6 179 782 846	6 826 862 952	9 658 666 533
13.	Jawa Tengah	3 499 864 177	2 963 856 035	3 745 182 609	5 359 325 200
14.	D I Yogyakarta	437 147 781	441 914 970	562 260 179	768 176 098
15.	Jawa Timur	4 903 476 408	4 673 473 427	5 412 737 369	5 504 707 600
16.	Banten	1 331 719 638	1 244 666 640	1 500 205 771	1 847 838 600
17.	B a l i	689 580 542	867 202 764	809 295 976	1 218 244 014
18.	Nusa Tenggara Barat	669 157 984	536 698 599	686 038 528	749 481 363
19.	Nusa Tenggara Timur	960 359 791	932 596 147	1 171 350 214	1 458 913 750
20.	Kalimantan Barat	598 994 336	666 837 274	802 457 462	1 035 101 400
21.	Kalimantan Tengah	289 034 924	332 463 903	604 198 436	534 956 586
22.	Kalimantan Selatan	411 285 086	412 026 386	669 242 425	656 601 800
23.	Kalimantan Timur	1 567 763 966	909 317 897	966 801 166	1 171 123 100
24.	Kalimantan Utara	0	94 624 945	248 342 543	231 935 200
25.	Sulawesi Utara	262 920 572	294 610 568	548 284 694	552 620 200
26.	Sulawesi Tengah	328 963 444	363 244 679	578 491 677	612 038 500
27.	Sulawesi Selatan	1 028 773 966	950 682 805	1 221 910 000	1 324 050 600
28.	Sulawesi Tenggara	295 628 063	324 556 946	419 566 403	584 663 400
29.	Gorontalo	171 421 290	181 553 544	204 002 311	325 973 400
30.	Sulawesi Barat	158 222 764	173 152 932	233 733 427	388 165 000
31.	M a l u k u	459 681 993	306 012 795	388 797 248	370 083 458
32.	Maluku Utara	315 975 829	196 660 633	262 402 128	309 203 400
33.	Papua Barat	467 016 555	463 623 362	514 552 922	569 541 900
34.	P a p u a	651 084 026	732 224 238	835 350 289	851 750 900
JUMLAH/TOTAL		35 964 403 377	33 018 207 958	39 957 250 083	49 867 423 156

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABEL 5.A.5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	292 533 440	309 012 899	250 088 300	247 234 200
2.	Sumatera Utara	43 718 380	1 065 000	0	0
3.	Sumatera Barat	28 909 462	0	0	0
4.	R i a u	20 887 500	13 015 000	855 180	10 000 000
5.	J a m b i	33 441 017	19 518 750	0	0
6.	Sumatera Selatan	399 597	513 384	380 000	600 000
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	5 448 514	4 521 800	6 409 900	6 000 000
9.	Bangka Belitung	2 611 950	745 500	666 700	1 000 000
10.	Kepulauan Riau	134 215 225	40 688 431	58 079 160	22 910 000
11.	DKI Jakarta	1 044 598 130	680 155 340	2 087 123 200	2 524 193 425
12.	Jawa Barat	13 600 215	2 871 320	3 048 750	19 456 000
13.	Jawa Tengah	14 362 375	23 281 040	18 715 300	41 650 000
14.	D I Yogyakarta	12 509 469	9 919 078	7 073 500	4 683 000
15.	Jawa Timur	32 672 903	8 434 380	8 130 227	10 000 000
16.	Banten	36 185 650	86 602 000	131 217 500	152 040 000
17.	B a l i	144 236 452	147 024 713	151 729 625	179 542 785
18.	Nusa Tenggara Barat	55 886 880	25 477 063	30 622 895	33 648 890
19.	Nusa Tenggara Timur	29 518 270	22 191 490	20 957 580	21 830 000
20.	Kalimantan Barat	948 000	252 000	1 895 000	720 000
21.	Kalimantan Tengah	59 366 720	69 886 615	67 090 690	64 509 000
22.	Kalimantan Selatan	239 550	1 325 000	0	0
23.	Kalimantan Timur	3 940 000	4 249 500	4 419 500	5 954 000
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	5 000 000
25.	Sulawesi Utara	5 230 000	12 316 500	300 000	410 000
26.	Sulawesi Tengah	3 116 500	4 124 500	2 025 000	2 000 000
27.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
28.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
29.	Gorontalo	556 000	1 479 000	3 006 000	2 487 500
30.	Sulawesi Barat	122 400	11 125 744	13 650 744	12 006 531
31.	M a l u k u	4 992 696	2 016 380	11 945 863	13 272 000
32.	Maluku Utara	26 406 259	15 042 365	11 856 100	7 600 000
33.	Papua Barat	38 319 893	35 295 750	44 192 000	29 730 000
34.	P a p u a	178 167 170	88 453 792	94 308 781	78 508 726
JUMLAH/TOTAL		2 267 140 617	1 640 604 334	3 029 787 495	3 496 986 057

*) Data APBD

TABEL 5.A.6 REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	269 719 474	298 490 577	503 280 080	659 792 090
2.	Sumatera Utara	522 121 373	1 692 809 639	2 330 828 370	2 478 630 055
3.	Sumatera Barat	416 913 494	546 614 466	669 370 829	664 893 368
4.	R i a u	874 713 339	1 614 630 539	1 233 314 138	1 283 579 949
5.	J a m b i	315 495 683	462 356 647	467 708 760	481 755 700
6.	Sumatera Selatan	115 227 612	268 508 790	115 950 085	181 505 921
7.	Bengkulu	142 626 514	211 055 929	211 928 326	239 965 745
8.	Lampung	357 471 263	723 095 813	762 543 531	1 100 000 000
9.	Bangka Belitung	177 383 056	212 859 717	303 413 475	245 671 793
10.	Kepulauan Riau	283 495 455	252 894 344	315 613 621	670 000 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	3 994 277 232	5 461 539 028	6 406 192 658	6 384 562 828
13.	Jawa Tengah	1 825 598 247	3 263 403 899	4 130 087 481	5 356 597 095
14.	D I Yogyakarta	376 702 291	472 309 827	583 092 613	561 340 599
15.	Jawa Timur	3 081 718 245	4 934 876 836	4 667 452 412	5 230 830 339
16.	Banten	1 334 273 510	1 764 024 523	1 920 559 281	1 978 572 522
17.	B a l i	671 432 090	910 123 410	1 088 091 712	1 149 555 167
18.	Nusa Tenggara Barat	215 435 740	454 803 323	435 441 046	477 787 961
19.	Nusa Tenggara Timur	141 657 476	267 099 625	317 680 998	357 699 134
20.	Kalimantan Barat	455 946 490	435 940 603	845 411 837	824 209 145
21.	Kalimantan Tengah	485 973 440	527 398 945	372 558 292	753 738 017
22.	Kalimantan Selatan	1 088 250 666	1 195 304 364	1 092 049 850	1 267 997 281
23.	Kalimantan Timur	2 692 808 046	2 563 201 309	2 440 676	2 098 380 349
24.	Kalimantan Utara	0	0	83 619 643	157 377 652
25.	Sulawesi Utara	256 177 100	293 834 637	327 901 116	425 568 273
26.	Sulawesi Tengah	194 496 854	305 162 965	307 534 979	356 144 474
27.	Sulawesi Selatan	843 117 427	1 101 354 583	1 175 949 066	1 383 430 648
28.	Sulawesi Tenggara	214 814 429	203 217 978	217 328 398	242 118 442
29.	Gorontalo	78 238 394	112 638 502	122 823 973	144 732 722
30.	Sulawesi Barat	51 538 654	112 595 242	0	116 188 424
31.	M a l u k u	91 395 308	102 848 334	183 231 747	197 180 282
32.	Maluku Utara	33 534 852	83 272 108	129 990 936	102 136 262
33.	Papua Barat	777 049 506	713 746 670	1 180 116 277	890 000 000
34.	P a p u a	232 800 665	280 781 136	290 677 197	105 807 767
JUMLAH/TOTAL		22 612 403 925	31 842 794 308	32 794 183 403	38 567 750 004

*) Data APBD

TABEL 5.A.7 **REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE **ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	801 680 060	3 407 472 166	3 343 547 380	3 045 563 418
2.	Sumatera Utara	1 687 837 008	1 053 174 611	405 929 355	178 809 910
3.	Sumatera Barat	85 739 275	94 969 449	122 483 415	150 731 948
4.	R i a u	263 093 534	114 713 156	983 054 355	1 580 209 408
5.	J a m b i	150 386 797	138 550 780	119 320 829	10 231 845
6.	Sumatera Selatan	804 677 610	1 413 549 040	576 359 567	812 627 114
7.	Bengkulu	15 627 639	21 144 500	1 567 942	21 729 359
8.	Lampung	170 214 409	20 173 866	22 253 049	31 750 000
9.	Bangka Belitung	161 262 246	200 796 461	206 510 261	369 559 622
10.	Kepulauan Riau	188 604 802	197 356 711	78 215 728	36 578 411
11.	DKI Jakarta	44 286 271	14 005 707	371 152 504	1 818 004
12.	Jawa Barat	3 504 341 590	3 738 146 028	4 329 955 773	3 523 311 001
13.	Jawa Tengah	2 503 166 398	2 661 510 573	2 303 371 333	2 299 344 378
14.	D I Yogyakarta	123 025 480	121 560 575	117 696 373	91 814 411
15.	Jawa Timur	986 232 679	2 362 512 570	3 149 506 610	1 656 070 544
16.	Banten	190 749 815	436 986 099	657 845 799	536 755 303
17.	B a l i	472 642 328	497 128 613	690 452 391	753 476 984
18.	Nusa Tenggara Barat	67 117 173	38 517 986	12 762 278	26 621 051
19.	Nusa Tenggara Timur	15 209 207	29 252 565	27 459 614	24 679 245
20.	Kalimantan Barat	267 175 476	414 606 863	320 662 955	348 179 024
21.	Kalimantan Tengah	165 887 728	154 846 272	165 953 964	4 700 000
22.	Kalimantan Selatan	36 878 830	38 419 519	33 505 812	1 464 402
23.	Kalimantan Timur	2 059 339 474	2 005 786 032	2 330 897 807	1 461 640 800
24.	Kalimantan Utara	0	0	266 011 000	406 033 500
25.	Sulawesi Utara	899 998	69 957 386	9 833 144	11 280 000
26.	Sulawesi Tengah	65 745 494	117 267 144	106 638 838	14 272 804
27.	Sulawesi Selatan	572 441 642	525 489 443	458 845 583	400 217 642
28.	Sulawesi Tenggara	96 245 018	104 700 709	86 359 189	87 951 109
29.	Gorontalo	31 158 408	21 600 082	18 135 176	22 156 585
30.	Sulawesi Barat	28 337 950	0	0	35 156 013
31.	M a l u k u	19 008 296	24 215 570	16 407 977	18 980 012
32.	Maluku Utara	0	0	11 220 596	18 900 000
33.	Papua Barat	1 120 101 441	1 485 457 207	1 556 056 852	1 681 659 107
34.	P a p u a	3 348 440 831	4 562 248 919	4 829 851 734	3 157 815 854
JUMLAH/TOTAL		20 047 554 907	26 086 116 602	27 729 825 183	22 822 088 808

*) Data APBD

TABEL 5.A.8 REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABLE *ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016*

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	61 380 278	1 920 748	3 645 096	43 500 000
2.	Sumatera Utara	498 100	4 482 346	0	7 500 000
3.	Sumatera Barat	900 000	603 312	43 218	16 450 000
4.	R i a u	0	0	0	18 000 000
5.	J a m b i	2 087 472	1 710 356	1 046 110	5 100 000
6.	Sumatera Selatan	582 299	857 938	1 038 000	5 000 000
7.	Bengkulu	1 821 108	505 443	0	8 500 000
8.	Lampung	20 036 457	5 230 162	0	33 550 192
9.	Bangka Belitung	0	16 885	95 176	2 000 000
10.	Kepulauan Riau	2 014 570	30 000	576 000	3 000 000
11.	DKI Jakarta	11 376 869	2 136 402	877 075	128 515 818
12.	Jawa Barat	0	130 079	0	50 000 000
13.	Jawa Tengah	2 188 235	8 211 750	12 003 231	46 667 750
14.	D I Yogyakarta	0	1 953 935	0	12 500 000
15.	Jawa Timur	60 252 218	93 319 440	28 426 545	100 000 000
16.	Banten	0	0	4 497 453	35 000 000
17.	B a l i	1 588 561	4 342 146	189 045	15 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	2 211 655	105 278	2 240 532	10 930 960
19.	Nusa Tenggara Timur	4 375 368	18 769 508	1 050 798	10 000 000
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	5 000 000
21.	Kalimantan Tengah	1 152 678	967 936	2 767 260	6 438 800
22.	Kalimantan Selatan	1 872 433	2 503 981	1 984 439	7 000 000
23.	Kalimantan Timur	0	1 500 000	3 434 246	20 000 000
24.	Kalimantan Utara	0	400 000	500 000	10 000 000
25.	Sulawesi Utara	1 018 827	1 586 104	429 250	10 000 000
26.	Sulawesi Tengah	89 955	833 976	126 979	2 500 000
27.	Sulawesi Selatan	3 703 884	963 284	0	24 748 541
28.	Sulawesi Tenggara	3 953 070	0	0	25 253 871
29.	Gorontalo	335 873	1 058 215	2 451 048	5 000 000
30.	Sulawesi Barat	265 000	0	0	1 000 000
31.	M a l u k u	2 430 573	1 841 897	1 925 669	7 500 000
32.	Maluku Utara	26 100	500 000	941 770	2 000 000
33.	Papua Barat	2 882 500	0	0	10 000 000
34.	P a p u a	12 556 773	11 595 345	10 977 669	0
JUMLAH/TOTAL		201 600 856	168 076 466	81 266 609	687 655 932

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.B

REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	7 756 157 285	6 465 772 436	6 505 823 422	6 830 030 938
2.	Sumatera Utara	2 256 064 927	2 437 145 478	2 073 083 486	2 891 355 120
3.	Sumatera Barat	1 445 156 684	1 651 799 638	1 662 835 437	2 113 127 235
4.	R i a u	4 232 409 979	2 170 603 791	3 627 234 830	5 583 724 230
5.	J a m b i	1 738 815 356	1 721 517 300	1 663 174 974	2 003 524 505
6.	Sumatera Selatan	1 995 509 103	1 760 106 497	2 081 477 692	2 229 365 348
7.	Bengkulu	931 694 776	1 025 967 285	1 213 037 385	1 395 855 598
8.	Lampung	2 072 655 734	2 309 626 502	2 196 686 698	2 229 444 373
9.	Bangka Belitung	801 348 925	740 305 877	789 106 649	1 133 389 649
10.	Kepulauan Riau	1 520 685 847	2 098 638 305	1 385 777 170	1 619 454 851
11.	DKI Jakarta	25 152 900 311	25 167 779 696	22 324 117 934	34 382 577 360
12.	Jawa Barat	3 672 632 315	3 839 172 071	5 161 325 715	6 847 772 774
13.	Jawa Tengah	3 511 079 685	4 439 160 853	5 424 696 529	6 386 924 324
14.	D I Yogyakarta	1 069 181 078	1 420 910 964	1 685 485 375	2 119 075 879
15.	Jawa Timur	6 048 844 119	6 306 212 284	7 871 472 846	7 656 129 443
16.	Banten	1 979 069 495	2 178 547 864	3 325 176 946	3 609 341 541
17.	B a l i	1 260 913 651	1 340 543 869	1 515 888 269	1 681 222 769
18.	Nusa Tenggara Barat	897 421 047	1 055 265 236	1 633 495 638	1 628 576 568
19.	Nusa Tenggara Timur	791 017 156	958 813 561	1 283 703 881	1 459 002 857
20.	Kalimantan Barat	1 532 360 118	1 588 506 036	1 508 390 153	1 841 686 972
21.	Kalimantan Tengah	1 566 774 812	1 750 774 460	1 833 317 047	2 267 236 977
22.	Kalimantan Selatan	2 693 290 021	2 675 591 544	2 668 454 369	3 107 138 705
23.	Kalimantan Timur	6 676 810 264	4 859 951 094	4 347 690 549	5 287 048 110
24.	Kalimantan Utara	0	501 133 396	1 185 199 377	1 591 970 250
25.	Sulawesi Utara	1 103 819 186	1 088 467 705	1 283 744 512	1 465 306 975
26.	Sulawesi Tengah	1 202 329 811	1 278 327 985	1 427 204 358	1 738 736 686
27.	Sulawesi Selatan	1 730 806 859	2 153 546 288	2 351 406 402	2 507 617 408
28.	Sulawesi Tenggara	752 613 024	974 527 586	1 113 724 658	1 244 033 513
29.	Gorontalo	544 773 920	646 364 708	787 826 560	888 396 097
30.	Sulawesi Barat	605 373 178	719 815 524	895 610 256	1 336 303 742
31.	M a l u k u	637 219 990	895 264 571	1 210 862 620	1 413 386 060
32.	Maluku Utara	795 692 214	920 652 250	1 054 649 285	1 509 806 577
33.	Papua Barat	1 934 518 145	2 552 145 929	3 377 772 879	3 409 063 504
34.	P a p u a	3 090 757 039	3 884 225 042	5 416 259 242	1 860 752 132
JUMLAH/TOTAL		94 000 696 054	95 577 183 625	103 885 713 143	125 268 379 070

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.B.1

**REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
**ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	487 041 503	364 456 742	435 005 438	466 054 639
2.	Sumatera Utara	167 575 793	144 540 209	151 092 148	175 532 064
3.	Sumatera Barat	117 827 070	116 677 136	100 029 258	14 954 451
4.	R i a u	319 820 084	188 187 847	215 518 119	340 557 333
5.	J a m b i	98 333 655	90 004 993	110 945 007	149 339 146
6.	Sumatera Selatan	58 351 300	23 441 741	5 368 504	5 947 638
7.	Bengkulu	90 923 857	96 977 553	107 604 273	126 557 221
8.	Lampung	100 476 762	109 214 896	90 380 434	103 174 826
9.	Bangka Belitung	79 233 302	70 712 734	81 446 273	111 621 355
10.	Kepulauan Riau	189 822 416	183 736 097	163 651 073	208 662 720
11.	DKI Jakarta	1 815 488 704	2 132 264 555	1 446 281 119	1 575 091 994
12.	Jawa Barat	426 605 110	304 590 204	223 252 161	271 904 077
13.	Jawa Tengah	373 147 586	470 795 604	294 192 183	376 107 634
14.	D I Yogyakarta	143 754 843	111 425 291	128 727 296	150 710 364
15.	Jawa Timur	1 070 076 913	656 587 346	662 267 949	625 129 744
16.	Banten	181 862 098	144 776 980	156 935 313	159 567 244
17.	B a l i	41 906 917	62 150 385	83 696 356	102 527 199
18.	Nusa Tenggara Barat	81 597 916	89 028 411	121 707 586	131 099 471
19.	Nusa Tenggara Timur	105 220 376	77 667 705	90 070 776	107 314 681
20.	Kalimantan Barat	143 022 608	151 348 580	149 317 200	119 271 421
21.	Kalimantan Tengah	67 960 906	71 273 654	139 076 929	164 048 005
22.	Kalimantan Selatan	175 877 019	141 220 680	166 567 850	105 506 983
23.	Kalimantan Timur	568 035 669	494 060 058	311 271 403	408 100 427
24.	Kalimantan Utara	0	35 906 166	92 740 579	143 192 675
25.	Sulawesi Utara	70 928 416	35 073 022	22 775 699	32 286 410
26.	Sulawesi Tengah	140 508 898	148 177 160	143 934 108	129 115 338
27.	Sulawesi Selatan	186 117 682	168 276 411	188 238 513	199 108 535
28.	Sulawesi Tenggara	62 484 468	58 057 283	55 814 254	55 862 026
29.	Gorontalo	36 434 870	35 278 153	52 049 234	49 765 304
30.	Sulawesi Barat	34 830 232	0	129 750	8 193 165
31.	M a l u k u	64 172 558	30 606 186	5 970 209	8 553 154
32.	Maluku Utara	69 715 759	77 207 847	107 589 459	97 443 471
33.	Papua Barat	128 783 417	136 216 566	135 607 772	159 691 893
34.	P a p u a	175 893 795	196 401 072	190 579 265	100 792 733
JUMLAH/TOTAL		7 873 832 502	7 216 339 267	6 429 833 490	6 982 785 341

*) Data APBD

TABEL 5.B.2 **REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013-2016**
TABLE **ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	5 618 995 231	3 703 813 328	4 045 714 495	3 781 561 104
2.	Sumatera Utara	1 327 766 717	1 146 633 041	989 746 989	1 472 525 876
3.	Sumatera Barat	635 840 015	749 234 578	774 656 224	934 074 100
4.	R i a u	1 667 282 867	1 358 771 642	1 397 229 026	2 711 043 123
5.	J a m b i	702 495 631	813 453 043	760 927 878	766 805 438
6.	Sumatera Selatan	1 074 254 135	1 005 053 067	1 035 087 257	981 543 245
7.	Bengkulu	563 392 939	623 936 194	626 251 826	680 601 214
8.	Lampung	1 168 089 647	1 274 956 923	1 237 307 069	1 059 030 949
9.	Bangka Belitung	319 349 046	364 039 655	473 942 523	680 980 654
10.	Kepulauan Riau	937 953 666	1 196 907 727	880 841 202	1 002 810 707
11.	DKI Jakarta	12 641 399 413	12 624 396 751	10 633 820 106	16 624 523 868
12.	Jawa Barat	1 973 247 376	2 174 779 252	2 639 397 429	3 029 926 425
13.	Jawa Tengah	2 143 191 579	2 397 685 838	2 615 822 791	2 863 293 876
14.	D I Yogyakarta	556 030 441	867 039 199	929 155 893	1 020 959 720
15.	Jawa Timur	3 803 016 160	4 442 168 317	4 950 884 825	4 797 425 073
16.	Banten	983 932 220	1 342 286 491	1 732 271 926	1 719 249 707
17.	B a l i	764 537 190	907 808 176	869 956 280	773 741 640
18.	Nusa Tenggara Barat	365 543 941	543 439 395	677 203 973	809 514 110
19.	Nusa Tenggara Timur	460 616 404	473 545 067	586 930 890	655 805 837
20.	Kalimantan Barat	898 826 047	946 938 051	990 530 746	1 078 297 471
21.	Kalimantan Tengah	558 211 280	864 992 982	735 098 575	909 060 532
22.	Kalimantan Selatan	1 177 554 354	1 267 486 876	1 280 154 128	1 499 967 337
23.	Kalimantan Timur	2 457 642 779	2 154 573 721	2 025 501 327	2 188 351 275
24.	Kalimantan Utara	0	240 588 072	423 849 113	713 272 455
25.	Sulawesi Utara	645 754 385	546 671 365	503 691 768	688 552 669
26.	Sulawesi Tengah	706 301 866	853 319 017	840 745 925	1 050 878 039
27.	Sulawesi Selatan	1 054 475 228	1 309 032 668	1 313 862 831	1 439 629 854
28.	Sulawesi Tenggara	259 411 676	362 977 173	374 401 879	385 932 663
29.	Gorontalo	323 379 712	378 661 812	391 533 251	459 914 290
30.	Sulawesi Barat	387 091 610	452 797 262	450 252 488	497 426 169
31.	M a l u k u	379 456 442	495 328 479	662 106 967	715 552 804
32.	Maluku Utara	336 245 301	415 479 700	523 567 485	666 948 887
33.	Papua Barat	972 065 646	1 224 141 281	1 565 161 033	1 776 375 687
34.	P a p u a	1 694 118 393	1 998 521 178	2 360 218 215	953 677 777
JUMLAH/TOTAL		49 557 469 337	51 521 457 321	52 297 824 333	61 389 254 575

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016
TABEL 5.B.3 ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 650 120 551	2 397 502 366	2 025 103 489	2 582 415 195
2.	Sumatera Utara	760 722 417	1 145 972 228	932 244 349	1 243 297 180
3.	Sumatera Barat	691 489 599	785 887 924	788 149 955	1 164 098 684
4.	R i a u	2 245 307 028	623 644 302	2 014 487 685	2 532 123 774
5.	J a m b i	937 986 070	818 059 264	791 302 089	1 087 379 921
6.	Sumatera Selatan	862 903 668	731 611 689	1 041 021 931	1 241 874 465
7.	Bengkulu	277 377 980	305 053 538	479 181 286	588 697 163
8.	Lampung	804 089 325	925 454 683	868 999 195	1 067 238 598
9.	Bangka Belitung	402 766 577	305 553 488	233 717 853	340 787 640
10.	Kepulauan Riau	392 909 765	717 994 481	341 284 895	407 981 424
11.	DKI Jakarta	10 696 012 194	10 411 118 390	10 244 016 709	16 182 961 498
12.	Jawa Barat	1 272 779 829	1 359 802 615	2 298 676 125	3 545 942 272
13.	Jawa Tengah	994 740 520	1 570 679 411	2 514 681 555	3 147 522 814
14.	D I Yogyakarta	369 395 794	442 446 474	627 602 186	947 405 795
15.	Jawa Timur	1 175 751 046	1 207 456 621	2 258 320 072	2 233 574 626
16.	Banten	813 275 177	691 484 393	1 435 969 707	1 730 524 590
17.	B a l i	454 469 544	370 585 308	562 235 633	804 953 930
18.	Nusa Tenggara Barat	450 279 190	422 797 430	834 584 079	687 962 987
19.	Nusa Tenggara Timur	225 180 376	407 600 789	606 702 215	695 882 339
20.	Kalimantan Barat	490 511 463	490 219 405	368 542 207	644 118 080
21.	Kalimantan Tengah	940 602 626	814 507 824	959 141 543	1 194 128 440
22.	Kalimantan Selatan	1 339 858 648	1 266 883 988	1 221 732 391	1 501 664 385
23.	Kalimantan Timur	3 651 131 816	2 211 317 315	2 010 917 819	2 690 596 408
24.	Kalimantan Utara	0	224 639 158	668 609 685	735 505 120
25.	Sulawesi Utara	387 136 385	506 723 318	757 277 045	744 467 896
26.	Sulawesi Tengah	355 519 047	276 831 808	442 524 325	558 743 309
27.	Sulawesi Selatan	490 213 949	676 237 209	849 305 058	868 879 019
28.	Sulawesi Tenggara	430 716 880	553 493 130	683 508 525	802 238 824
29.	Gorontalo	184 959 338	232 424 743	344 244 075	378 716 503
30.	Sulawesi Barat	183 451 336	267 018 262	445 228 018	830 684 408
31.	M a l u k u	193 590 990	369 329 906	542 785 444	689 280 102
32.	Maluku Utara	389 731 154	427 964 703	423 492 341	745 414 219
33.	Papua Barat	833 669 082	1 191 788 082	1 677 004 074	1 472 995 924
34.	P a p u a	1 220 744 851	1 689 302 792	2 865 461 762	806 281 622
JUMLAH/TOTAL		36 569 394 215	36 839 387 037	45 158 055 320	56 896 339 154

*) Data APBD

**TABEL
TABLE****5.C****REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2013-2016****ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2013-2016**

No.	Provinsi/Province	2013	2014	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 420 098 087	959 801 070	461 684 483	5 000 000
2.	Sumatera Utara	151 626 064	14 897 905	536 489 675	24 268 281
3.	Sumatera Barat	311 276 961	392 442 367	304 096 991	50 000 000
4.	R i a u	1 447 676 414	3 981 422 303	3 131 883 625	0
5.	J a m b i	566 330 980	474 526 425	178 679 152	0
6.	Sumatera Selatan	310 770 643	476 814 225	840 195 373	1 423 130 769
7.	Bengkulu	210 719 600	261 693 705	153 858 701	17 793 392
8.	Lampung	41 126 275	113 486 180	117 581 142	90 250 000
9.	Bangka Belitung	204 466 081	325 473 641	342 693 794	0
10.	Kepulauan Riau	642 174 655	145 250 971	44 384 283	0
11.	DKI Jakarta	10 679 763 146	13 618 631 039	10 387 697 130	7 222 619 000
12.	Jawa Barat	3 775 496 831	5 099 436 397	4 144 246 614	803 575 000
13.	Jawa Tengah	1 924 599 491	1 760 833 255	696 830 292	200 000 000
14.	D I Yogyakarta	476 614 048	548 330 738	414 682 428	137 000 000
15.	Jawa Timur	2 387 620 461	2 612 951 724	1 732 342 039	708 333 333
16.	Banten	1 385 904 864	1 946 082 208	1 152 074 818	72 500 000
17.	B a l i	1 139 839 942	1 125 742 772	874 677 370	86 996 540
18.	Nusa Tenggara Barat	28 134 779	189 155 598	282 429 796	31 024 821
19.	Nusa Tenggara Timur	257 704 279	329 644 828	241 732 624	60 000 000
20.	Kalimantan Barat	187 965 679	194 600 710	84 111 430	80 000 000
21.	Kalimantan Tengah	439 704 834	280 614 254	64 495 161	146 602 500
22.	Kalimantan Selatan	804 661 308	738 732 079	397 409 121	28 000 000
23.	Kalimantan Timur	1 050 356 121	1 061 628 546	777 324 517	0
24.	Kalimantan Utara	0	1 184 448 975	735 234 473	150 000 000
25.	Sulawesi Utara	289 406 246	340 708 660	125 583 942	25 000 000
26.	Sulawesi Tengah	135 496 072	142 474 915	84 136 672	9 200 000
27.	Sulawesi Selatan	93 178 272	242 455 881	265 955 474	186 000 000
28.	Sulawesi Tenggara	363 294 946	431 964 051	537 415 421	104 399 201
29.	Gorontalo	102 841 865	97 002 816	68 395 981	1 500 000
30.	Sulawesi Barat	131 168 699	142 074 163	87 907 830	2 000 000
31.	M a l u k u	118 453 994	186 416 361	24 445 099	34 235 885
32.	Maluku Utara	53 531 135	51 153 914	47 370 415	12 000 000
33.	Papua Barat	1 497 841 857	1 667 907 507	626 103 896	85 002 632
34.	P a p u a	958 202 863	1 239 234 968	590 184 665	2 234 150 308
JUMLAH/TOTAL		33 588 047 492	42 378 035 151	30 554 334 427	14 030 581 662

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI 2013-2016

Anggota Tim Penyusun:

Koordinator : Dr. Titi Kanti Lestari, SE, M.Com.

Editor : Mila Hertinmalyana, M.Comm.
Maskurdin, S.ST.

Penulis : Izzun Nafiah, SST

Pengolah Data : Desy Apresziyanti, SST

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

